



# LAPORAN KINERJA(LKJ) TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
JL. A. SYAIRANI KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA PELAIHARI 70814  
TELP. (0512) 21863 NO. FAXIMILE (0512) 21009

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai perwujudan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pelaihari, Januari 2022



## IKHTISAR EKSEKUTIF



Ir. H. Muhammad Mursyi, M. Si  
Sekretaris DPRD Kab. Tanah Laut

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan Wujud Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini ketiga RPJMD 2018-2023. Selain Media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, laporan kinerja juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus menggambarkan keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 (satu) sasaran yang diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja utama dan 4 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 11 (sebelas) indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan /Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis diatas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Baik**. Hal ini berdasarkan pada hasil pengukuran target pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan Tahun 2022 terhadap realisasi pencapaian target Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 1 (satu) sasaran 1 (satu) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian kinerja **sangat memuaskan**. Indikator kinerja Program yang terdiri dari 4 Sasaran dan 11 indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 133,02 % dengan rincian 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori cukup dan 8 indikator kinerja dengan katagori **Sangat memuaskan dan katagori memuaskan**.

Pencapaian Kinerja pada tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun sangat diharapkan kedepannya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 sangat diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2022



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .....	2
C. Isu Strategis .....	4
D. Produk dan Layanan .....	6
E. Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
A. Visi RPJMD .....	8
B. Misi RPJMD .....	8
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
D. Indikator Kinerja Utama .....	11
E. Perjanjian Kinerja .....	12
F. Program dan Kegiatan .....	17
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	19
1. Sasaran RPJMD .....	19
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut .....	21
3. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat .....	31
1. Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian .....	42
4. Kepala Bagian Keuangan .....	52
1. Kasubbag Perencanaan dan Anggaran .....	59
5. Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD .....	64
B. Akuntabilitas Keuangan .....	71
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022 .....	71
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program .....	77
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 .....	78

<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	84
A.    Kesimpulan .....	84
B.    Strategi Peningkatan Kinerja .....	84
<b>LAMPIRAN .....</b>	86

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1 Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	4
2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 .....	10
3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	12
4 Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	13
5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	17
6 Misi 3, Tujuan, Sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 .....	20
7 Indikator Kinerja utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut .....	21
8 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	22
9 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	22
10 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018 – 2022 .....	23
11 Jumlah Nilai Per Unsur, Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur, Dan Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per Unsur Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun 2022 .....	25
12 Realisasi Program Penunjang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	28
13 Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022 .....	30
14 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	32
15 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022 ....	34
16 Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat per Indikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022 .....	38
17 Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	40
18 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	43
19 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022.....	45
20 Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	47

21	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2022 .....	48
22	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2022 .....	49
23	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	52
24	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022 .....	53
25	Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2022 .....	54
26	Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Keuangan Perindikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022 .....	56
27	Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	57
28	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	59
29	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022 .....	60
30	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	62
31	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	64
32	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019-2022 .....	65
33	Realisasi Dan Target Capaian IKU Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2019 sd. 2022 .....	68
34	Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	69
35	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	71
36	Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja berdasarkan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	72
37	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	75
38	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	76
39	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	76
40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 .....	77

41	Program, Pagu dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 .....	78
42	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2022 .....	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ...	2
2 Rapat Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Badan Anggaran dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 pada tanggal 9 Agustus 2022.....	63
3 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum RT dan RW Kelurahan se-Kecamatan Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2022.....	66
4 Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propomperda) Kabupaten Tanah Laut, 16 November 2022.....	67
5 Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 17 Mei 2022.....	67

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1 Capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dan Jumlah Peningkatan Capaian Tahun 2018 – 2022.....	24

## **BAB I.** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

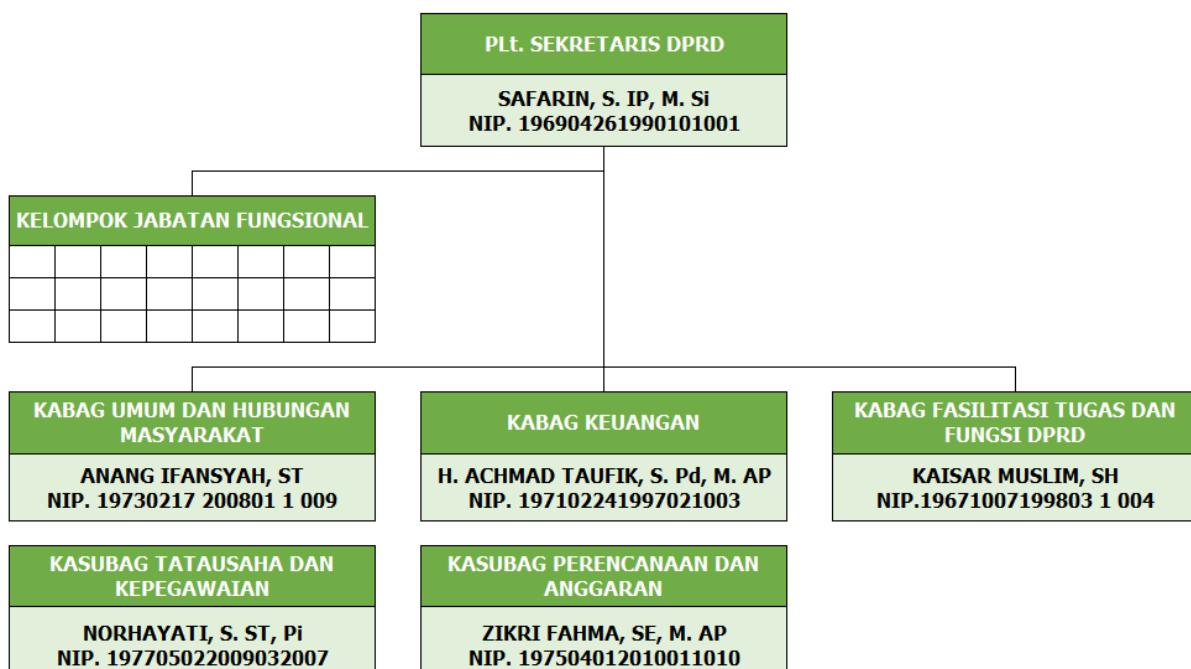
Atas dasar tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (Lkj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan dan media penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang

berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

## B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
4. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
5. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2022**

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Isu Strategis

Permasalahan strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sehingga perlu untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merumuskan permasalahan strategis yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsinya pada tabel berikut :

**Tabel 1. Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut**

Tugas Pokok dan Fungsi		Isu Strategis	
<b>Tugas Pokok</b>	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Administrasi Keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku	1.	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
<b>Fungsi</b>	a. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; c. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. pengelolaan urusan kesekretariatan DPRD.	2. 3. 4. 5. 6. 7.	Belum adanya perubahan pola pikir ( <i>mindset</i> ) terhadap tugas, pokok dan fungsi akibat adanya tingkat pendidikan aparatur yang berbeda sehingga terdapat ketidak sesuaian antara kemampuan aparatur dengan tugas, pokok dan fungsi yang dilaksanakan. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam mengikuti diklat sehingga kualitas yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terdapat ketidak serasan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian dalam Sekretariat DPRD. Distribusi pekerjaan yang kurang merata sehingga terdapat penumpukan volume pada satu Bagian. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting pada Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja ( <i>task environment</i> ) Sekretariat DPRD.

Ditinjau dari tugas, pokok dan fungsi SKPD yang mempengaruhi permasalahan serta tinjauan terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan analisis faktor internal dan eksternal maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.**

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, Keputusan DPRD dan Raperda inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Dewan, kegiatan reses, hearing, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

**2. Sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan.**

Kondisi sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan peralatan yang canggih agar agenda persidangan dan pemaparan materi dapat dilaksanakan lebih cepat dan akurat.

**3. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan.**

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi isu yang harus ditindak lanjuti dengan upaya peningkatan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis. Program diklat dan bimtek bidang manajemen pemerintahan, sistem informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.

**4. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah masih belum optimal.**

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

#### **D. Produk dan Layanan**

Produk dan layanan yang diberikan Sekretariat DPRD adalah berupa pelayanan dalam bentuk fasilitasi semua kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mencakup penyelenggaraan adminisitrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat - rapat DPRD, Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan, fasilitasi kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2021, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II
  - 3. Eselon III
- B. Akuntabilitas Keuangan**
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
  - 2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program
  - 3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2021 dan 2022

**BAB IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan**
- B. Strategi Peningkatan Kinerja**

**LAMPIRAN :**

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Per triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

## **BAB II.**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Visi RPJMD**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

- Berkarya : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- Inovasi : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- Tertata : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik {Good Governance)
- Religius : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
- Aktual : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **B. Misi RPJMD**

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

- 
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ).
  4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan.
  5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas, Sekretariat DPRD termasuk pada Misi ke-3 yaitu "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*)".

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi ke 3 (tiga) yaitu : "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)" dengan tujuan RPJMD "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip kepemerintahan yang baik" dan sasaran "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD".

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan "**Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD**". Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatnya kinerja layanan DPRD.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana, Kualitas SDM dan Kualitas Administrasi Kepegawaian.
3. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan informasi Publik, Kehumasan dan Keprotokolan DPRD.
4. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan Administrasi keuangan Sekretariat DPRD
5. Meningkatnya Fasilitasi dalam rangka menunjang Kinerja DPRD

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target 5 tahunan secretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07 (Baik)	77,08 (Baik)	77,09 (Baik)	77,1 (Baik)	77,11 (Baik)
			Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokol DPRD	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja yaitu, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Tingkat kepuasan Anggota DPRD diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun Target IKU sekretariat DPRD Tanah Laut Tahun 2022 sebesar 77,1 atau katagori Baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab /Sumber data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM) (77,1)	Sekretaris DPRD

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2022 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa

hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 telah disepakati baik oleh Sekretaris, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan Sub Koordinator sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut</b>		
	1. Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Baik (77,1)
2.	<b>Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat</b>		
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib 2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD 3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana 4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100% 100% 100% 100%
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya 2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100% 100%
3.	<b>Kepala Bagian Keuangan</b>		
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)

<b>4.</b>	<b>Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD</b>		
	1. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi 2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda 3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi 4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100% 100% 100% 100%
<b>7.</b>	<b>Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian</b>		
	1. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	1. Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen
	2. Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	2. Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang
	3. Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	3. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang
	4. Melaksanakan fasilitasi pemeriksa kesehatan anggota DPRD	4. Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang
	5. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	5. Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang
<b>8.</b>	<b>Kasubbag Perencanaan dan Anggaran</b>		
	1. Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	1. Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen

## F. Program dan Kegiatan

**Tabel 5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>26.231.786.316</b>
<b>4.02.02.2.08</b>	<b><i>Fasilitasi Tugas DPRD</i></b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198
<b>4.02.02.2.02</b>	<b><i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i></b>	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	94.394.280
<b>4.02.02.2.01</b>	<b><i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i></b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503
<b>4.02.02.2.03</b>	<b><i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i></b>	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169
<b>4.02.02.2.04</b>	<b><i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i></b>	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492
<b>4.02.02.2.05</b>	<b><i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i></b>	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>37.163.013.501</b>
<b>4.02.01.2.05</b>	<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000
<b>4.02.01.2.02</b>	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385
<b>4.02.01.2.06</b>	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745
<b>4.02.01.2.16</b>	<b><i>Layanan Administrasi DPRD</i></b>	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436
<b>4.02.01.2.15</b>	<b><i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i></b>	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104
	<b>JUMLAH</b>	<b>63.394.799.817</b>

## **BAB III.**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

##### **1. Sasaran RPJMD**

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai **Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)** Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 adalah **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** dimana untuk pencapaian visi tersebut telah ditetapkan **5 misi** pembangunan,.

Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2018-2023 akan berfokus pada pembinaan desa dan penataan kota (**desa dibina kota ditata**) dengan **bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas**. Dalam rangka pembinaan desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan akan menjalankan berbagai program pembangunan di setiap urusan kewenangan yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk penataan kota, program pembangunan yang dijalankan akan berfokus pada upaya mendorong kota menjadi kota yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Pembinaan desa dan penataan kota akan dijalankan secara sinergis antar perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Untuk mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, sesuai tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki Peran dalam pencapaian **misi ke 3 (tiga)** yaitu : **“Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance )”** sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dengan tujuan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi Informasi dengan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi pelayanan Publik, Meningkatkan Transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik, Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi daerah dan Kompetensi Aparatur, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. Misi 3, Tujuan, Sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023**

<p><i>Misi 3</i></p> <p><i>Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);</i></p>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan maturitas Penerapan SPIP.</li> </ol>
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pelayanan Publik SKPD.
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Peningkatan pemanfaatan data/informasi berbasis TI untuk mendukung penerapan e-Government

## 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

### 2.1. Target dan Capaian IKU

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon II sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Indikator Kinerja utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut**

No.	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM)	Sekretaris DPRD

Adapun untuk mengetahui katagori mutu pelayanan berdasarkan nilai interval, nilai interval konversi dan kinerja unit pelayanan pada hasil capaian indeks kepuasan hasil survey yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL (NI)</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</b>	<b>MUTU PELAYANAN (x)</b>	<b>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</b>
<b>1</b>	<b>1,00 – 2,5996</b>	<b>25,00 – 64,99</b>	<b>D</b>	<b>Tidak baik</b>
<b>2</b>	<b>2,60 – 3,064</b>	<b>65,00 – 76,60</b>	<b>C</b>	<b>Kurang baik</b>
<b>3</b>	<b>3,0644 – 3,532</b>	<b>76,61 – 88,30</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
<b>4</b>	<b>3,5324 – 4,00</b>	<b>88,31 – 100,00</b>	<b>A</b>	<b>Sangat baik</b>

Realisasi capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan hasil Survey tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dengan Indeks Kepuasan sebesar 78,26 atau 101,50% dari target tahun 2022 sebesar 77,1. Berdasarkan Tabel 8 tersebut diatas maka mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan katagori **Baik**.

Realisasi capain kinerja hingga tahun 2022 secara umum telah tercapai dan melampaui target akhir Renstra tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target Akhir Renstra 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,1	78,26	101,50%	77,11

Realisasi capaian kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap layanan Sekretariat DPRD diperbandingkan dengan salah satu instansi sejenis di Indonesia. Sekretariat DPRD diperbandingkan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Berdasarkan sumber data website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki nilai IKM sebesar 88,20 dengan jumlah responden 35 orang yang dilakukan pada triwulan 4 tahun 2022. Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten kebumen adalah meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD, ini selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD. Dari nilai IKM, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut masih rendah dibandingkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Hal ini perlu tekat dan kebersamaan semua jajaran di sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan layanan agar tingkat kepuasan anggota DPRD meningkat. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut juga menelaah pada sasaran organisasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia (RI) didapatkan informasi sebagai berikut:

### **Target Indikator Kinerja Program dalam Renstra Setjen DPR RI Periode 2020-2024**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasaan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasaan Anggota DPR atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3.22	3.24	3.26	3.28

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPRD RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2	4	6	8	10
	7. Jumlah Program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	2	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	BB	A	A	A

Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standarteknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: Bagian Perencanaan, Januari 2021

Pengukuran Capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3,27	Melebihi target
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas			
	a. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	Sesuai target
	b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	Sesuai target
	c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Sesuai target
	d. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	e. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	f. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 Unit	2 Unit	Sesuai target
	g. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	2	1	Belum mencapai target
	h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	A	Melebihi target
3	Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik			

a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Belum mencapai target
b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Melebihi target

Sumber: <https://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi>.

Dari dua tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua sasaran organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sasaran tersebut adalah:

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola Administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal; dan
- b. Menguatnya Kinerja Keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal.

Untuk indikator Kinerja Utama Sekretariat DPR RI Tahun 2020 hampir semua indikator capaiannya sesuai terget atau melebihi target kecuali pada angka 2 poin (g) terkait wujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas dengan indikator persentase jumlah program diklat yang memperoleh akreditas minimal “B” adalah target 2 terealisasi 1 dengan prosentase realisasi 50%.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki pencapaian yang sama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam capaian kinerja yaitu melebihi target yang telah ditetapkan. Yang membedakan adalah penetapan target dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut jauh lebih tinggi dari pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Target Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah 77,1 sedangkan target Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 adalah 3,24.

## **2.2. Uraian dan Analisis Capaian IKU**

### **a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD terealisasi dengan tingkat Baik (nilai 78,26) dari target Baik (nilai 77,09), sehingga dapat dilihat capaianya adalah 101,5 %.

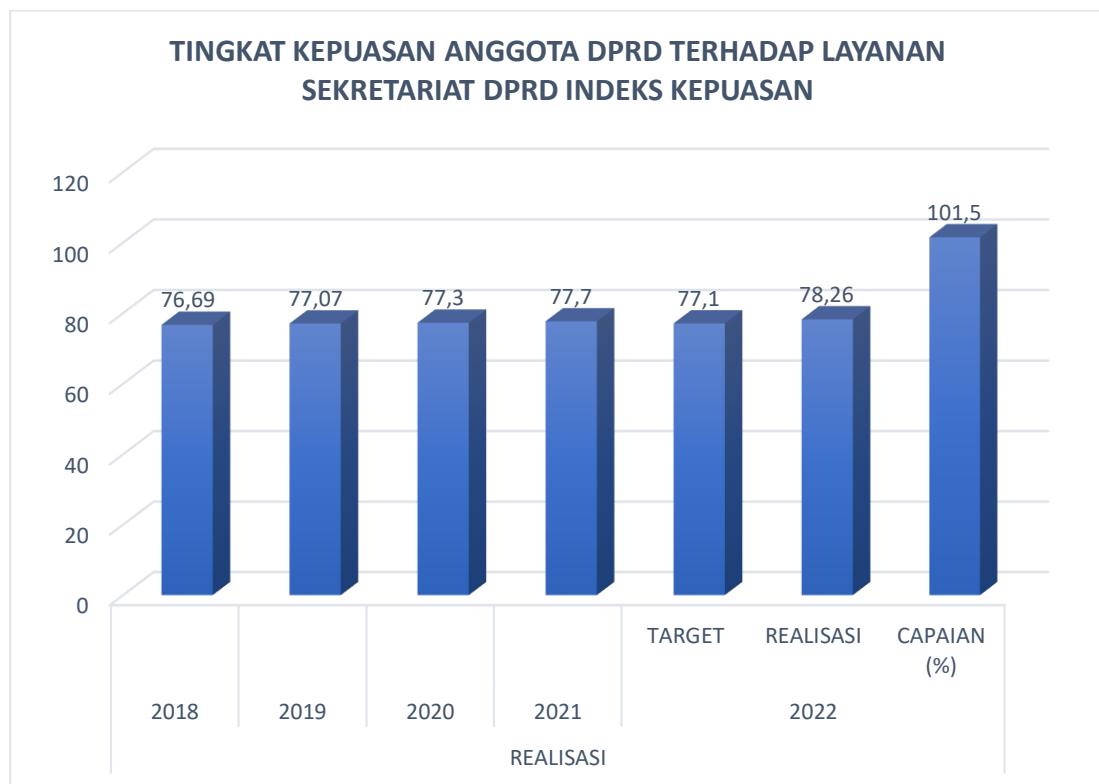
### **b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

Realisasi IKU sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai dengan 2022 terjadi trend peningkatan capaian kinerja. Peningkatan kinerja setiap tahunnya meningkat dari 0,23 - 0,56. Sekalipun trendnya meningkat, tapi di tahun 2019 ke 2020 peningkatan capaian menurun (0,23) dibandingkan dari tahun 2018 ke 2019 (0,38). Walaupun demikian peningkatan secara signifikan meningkat pada

tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,56 point. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan grafik 1.

**Tabel 10. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018 - 2022**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					2022	
		2018	2019	2020	2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan	76,69	77,07	77,3	77,7	77,1	78,26	101,5



**Grafik 1. Capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dan Jumlah Peningkatan Capaian Tahun 2018 – 2022**

### c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Kegiatan Survey kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dalam mengevaluasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Adapun Jenis pelayanan yang disurvei adalah:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Kemudahan prosedur pelayanan
3. Kecepatan pelayanan
4. Kepuasan dalam pelayanan kegiatan
5. Kesesuaian antara hasil produk layanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan/standar pelayanan.
6. Kompetensi/kemampuan petugas atau aparatur dalam memberikan pelayanan
7. Sikap dan perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam memberikan pelayanan
9. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Jumlah nilai unsur tertinggi ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai unsur terendah ada pada unsur sarana dan prasarana. Jumlah nilai IKM unit pelayanan sebesar 78,26 Hasil nilai unsur pelayanan berdasarkan jumlah nilai per unsur, jumlah nilai rata-rata per unsur, dan jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur, IKM per unsur dan IKM Unit Pelayanan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11. Jumlah Nilai Per Unsur, Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur, Dan Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per Unsur Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun 2022**

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\Sigma$ Nilai Per Unsur	110	113	106	105	107	108	112	100	126
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3,14	3,23	3,03	3,00	3,06	3,09	3,20	2,86	3,60
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur $\times 0,111$	0,35	0,36	0,34	0,33	0,34	0,34	0,36	0,32	0,40
IKM Per unsur	8,72	8,96	8,40	8,33	8,48	8,56	8,88	7,93	9,99
IKM Unit Pelayanan	<b>78,26</b>								

Berdasarkan hasil survey nilai IKM Unit pelayanan memperoleh nilai 78,26. Nilai tersebut berada pada rentang nilai interval konversi 76,61-88,30 dengan mutu pelayanan B yang berarti kinerja unit pelayanan ada pada katagori **Baik**.

Berdasarkan tabel 8, jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) perunsur diperoleh data 4 unsur memiliki nilai interval berada pada kisaran nilai 2,60 – 3,064 dengan mutu pelayanan **C (Kurang baik)** yaitu waktu pelayan (U3), pelaksanaan kegiatan (U4), produk layanan (U5) serta sarana dan prasarana (U8). Sedangkan 4 unsur lainnya berada pada kisaran nilai 3, 0644-3,53 dengan mutu pelayanan **B (baik)** yaitu unsur persyaratan (U1), prosedur pelayanan (U2), kompetensi petugas (U6) dan perilaku petugas (U7). Satu unsur yang memiliki nilai interval 3,6 yang masuk dalam katagori **A (sangat baik)** yaitu unsur penanganan terhadap pengaduan saran dan masukan.

Nilai IKM Unit pelayanan yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 masih bisa dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan agar kinerja unit pelayanan kedepannya bisa lebih baik/meningkat.

Dari hasil survey yang dilaksanakan tersebut menghasilkan mutu pelayanan dengan kinerja baik dalam rangka memberikan pelayanan oleh sekretariat DPRD terhadap pengguna layanan yang dalam hal ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Namun perlu disadari bahwa bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada “pelanggan” yang dalam hal ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagaimana pendapat responden yang masih merasakan hal-hal kekurangan tersebut. Mutu pelayanan dengan kinerja baik tersebut adalah capaian yang harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang. Semua unsur penilaian perlu mendapat perhatian, terutama unsur-unsur yang masih masuk dalam katagori C. Kekurangan-keurangan diatas harus segera diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa mendatang antara lain :

- a) Perbaikan sistem dan tata kerja untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan dan memberikan kecepatan dalam memberikan pelayanan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pengguna layanan.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana fisik pendukung dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c) Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap para pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan.
- d) Melakukan *reward* dan *punishment* dalam organisasi Sekretariat DPRD yang akan dapat membawa pengaruh positif terhadap organisasi. dimana :

- Mekanisme dan sistem kerja akan menjadi lebih baik, karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas,
- Kinerja individu dalam organisasi semakin meningkat, karena adanya sistem pengawasan yang obyektif dan tepat sasaran,
- Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi.

#### d. Analisis Program penunjang

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD di dukung oleh 2 (dua) Program penunjang, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 5 (halaman 17) bab II.

Program penunjang dengan pagu Rp. 63.394.799.817.- (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah.-*). dan realisasi sebesar Rp. 50.101.531.416.- (*Lima Puluh Milyar Seratus Satu Juta Dua Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah.-*). atau 79,03 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

**Tabel 12. Realisasi Program Penunjang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.231.786.316	16.694.263.024	63,64
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.163.013.501	33.407.268.392	89,89
<b>JUMLAH</b>		<b>63.394.799.817</b>	<b>50.101.531.416</b>	<b>79,03</b>

Dari tabel 12 tersebut diatas, jumlah realisasi terendah ada pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu sebesar Rp. 16.694.263.024.- (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua*

*Puluh Empat Rupiah.-) dari pagu Rp. 26.231.786.316 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah.-) dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 63,64% dari pagu program dan 26,33 % dari Pagu Total Anggaran Tahun 2022.*

Serapan tertinggi ada pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai Rp. 33.407.268.392 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah.-*) dari pagu Rp. 37.163.013.501 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Satu Rupiah.-*) dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 89,89% dari Pagu Program dan 52,70% dari Pagu Total Anggaran Tahun 2022.

Secara keseluruhan realisasi keseluruhan program adalah sebesar Rp. 50.101.531.416 (*Lima Puluh Milyar Seratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*) dari pagu 63.394.799.817 (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah.-*) dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 79,03% .

Realisasi Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 per sasaran per indikator tujuan/sasaran ada yang melampaui target setiap tahunnya, namun ada juga yang menurun realisasinya setiap tahun. Namun secara keseluruhan rata-rata pesentase realisasi indikator tujuan mencapai 133,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Adapun Persentase Capaian target tahun 2022 terhadap target akhir renstra adalah jumlah realisasi tahun 2022 dibagi target tahun 2023 dikali 100, sehingga dapat dilihat dalam perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2022}}{\text{Target Kinerja Tahun 2023}} \times 100$$

**Tabel 13. Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07 (Baik)	77,08 (Baik)	77,09 (Baik)	77,1 (Baik)	77,11 (Baik)	77,07 (Baik)	77,3 (Baik)	77,7 (Baik)	78,26 (Baik)	-	101,49
			Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasrama, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,70%	94,04%	100,23%	-	100,23
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320%	320%	-	320,00
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	114,28%	251,92%	-	251,92
				Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	89,00%	80,00%	66,29%	67,37%	-	67,37
				Persentasi Kegiatan DPRD yang terlaiyani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,25%	127,19%	176%	-	176,00
				Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	166%	107,70%	-	107,70
			Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB	B (67,54)	BB (77,89)	BB (79,5)	-	BB	
			Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97,25%	131,76%	106,67%	-	106,67
				Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	127%	100%	71,05%	66,67%	-	66,67
				Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%	67%	-	66,67
			Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00

#### e. Analisis atas penggunaan Sumberdaya

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja Sekretaris DPRD maka diperlukan sumberdaya (anggaran dan SDM) yang memadai yaitu Sumberdaya manusia yang kompeten, dan sumberdaya yang mencukupi serta sarana prasarana yang memadai.

Kondisi ideal di Sekretariat DPRD adalah jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan dalam analisa jabatan sebanyak 54 orang. Kondisi saat ini jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan sebanyak 33 orang per 31 Desember 2022. Masih dibutuhkan 21 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah menyampaikan usulan kekurangan jabatan yang ada ke BKPSDM untuk formasi jabatan CPNS/PPPK. Selain itu mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menaruh PTT/pegawai non PNS agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.

penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Adapun serapan Anggaran Sekretariat DPRD dilihat pada tabel 12 diatas jumlah serapan sebesar 79,03%. Dibandingkan dengan persentase realisasi capaian indikator kinerja esselon II sebesar 101,5% maka dapat dihitung efisiensi anggaran adalah persentase capaian IKU dikurang persentase serapan anggaran sehingga diperoleh 22,47%.

**1. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat****a. Target dan Capaian IKU**

Sasaran Strategis Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas pelayanan saran dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian memiliki 4 indikator yaitu 1). Persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dengan realisasi 100,23 % dari target 100 %, 2). Persentase pemenuhan tenaga ahli dengan realisasi 320 % dari target 100 %, 3). Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana dengan realisasi 251,92 % dari target 100% dan 4). Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan realisasi 67,37 % dari target 100 %.

Sasaran strategis ke-2 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan publik dengan 2 indikator kinerja yaitu 1). persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dengan realisasi 176 % dari target 100% dan 2). Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dengan realisasi 107,7 % dengan target 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100,23 %	100,23
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	320 %	320,00
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	251,92 %	51,92
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%	67,37 %	67,37
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokol DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	176 %	176
		2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	107,7%	107,7

## b. Uraian dan analisis Capaian IKU

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian realisasi per indikator kinerja dengan target 100% untuk semua indikator kinerja memiliki realisasi capaian kinerja yang kurang dari 100% adalah indikator Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia (67,37 %).

Realisasi indikator kinerja yang lebih dari 100% ada 5 indikator satu diantaranya mencapai lebih 3 kali lipat dari target yaitu Persentase pemenuhan tenaga ahli (320%) dan yang lain adalah Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana (251,92%), persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya (176%), Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib (100,23%) dan Persentase

penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD (107,7%) .

## **2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

Realisasi capaian persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dibandingkan tahun 2019 sebesar 100% terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 5,3 % dan tahun 2021 sebanyak 5,6%. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan mencapai 100,23% dari target 100%.

Peningkatan yang signifikan terjadi pada capaian persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dari capaian 100% pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 320% pada tahun 2021 dan 2022.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana meningkat pada tahun 2021 sebanyak 114,28% dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 100%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan hingga 251,92% dari target 100%.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia menurun dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan terjadi sejak tahun 2020 yang mencapai 80% dan 2021 sebesar 66,29%. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan 1,08 point dibandingkan tahun 2021 yaitu 67,37%.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya meningkat pada tahun 2021 sebesar 127,19% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 97,25% dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 48,81 point menjadi 176%.

Persentase realisasi penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mencapai 100% dari target dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 166%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi sebanyak 58,3% menjadi 107,7%.

Persentase capaian kinerja terhadap target akhir renstra tahun 2023 dihitung dari realiasi target 2022 dibagi target tahun 2023 dikali 100. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022**

Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	94,70%	94,04%	100,23%	-	100%	100,23
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	320%	320%	-	100%	320,00
	Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	114,28%	251,92%	-	100%	251,92
	Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	89,00%	80,00%	66,29%	67,37%	-	100%	67,37
	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	97,25%	127,19%	176%	-	100%	176,00
	Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	166%	107,70%	-	100%	107,70

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib bersumber dari dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani tahun 2022 merupakan data yang bersumber dari aktivitas organisasi yang bersumber dari kegiatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar serta dokumen kepegawaian yang dikelola. Untuk meningkatkan indikator kinerja, langkah kedepan yang harus diambil oleh Sekretariat DPRD adalah :

- memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;
- mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian;
- Meningkatkan pembinaan untuk mencapai kesejahteraan pegawai;
- Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian.

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian yaitu menyeimbangkan jumlah pegawai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD, menyesuaikan beban kerja yang ada dengan jumlah pegawai. Hal ini dilakukan untuk memastikan porsi atau kapasitas pekerjaan setiap pegawai sesuai dengan kemampuan dan beban kerjanya. Hasilnya dibeberapa bagian masih kekurangan jabatan fungsional umum yang berdampak pada kemampuan dan beban kerja yang lebih. Solusi yang diambil adalah menyampaikan surat permintaan jabatan fungsional umum ke BKPSDM baik melalui mutasi ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut maupun melalui Penerimaan CPNS dan PPPK.

Kegiatan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah berasal dari realisasi Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang difasilitasi tahun 2022 adalah merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi ASN dalam bentuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan lembaga resmi, dimana terlaksana sebanyak 11 orang (73,33%) dari target 15 orang dan diklat/bimtek anggota DPRD yang ditargetkan 175 orang hanya terealisasi 117 orang (66,86%). Realisasi dari 2 kegiatan tersebut diperoleh rata-rata capaian 67,37%. Tidak tercapainya target diklat/bimtek Anggota DPRD pada akhirnya sangat mempengaruhi realisasi keseluruhan untuk indikator kinerja persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tahun berikutnya agar pejabat yang mengelola kegiatan agar lebih tepat dalam menyusun perencanaan, anggaran dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi realisasi capaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD tercapai 320% dari target 100%. Capaian ini terpenuhinya tenaga ahli sebanyak 1 orang untuk masing-masing komisi I, komisi II, komisi III, banggar, bapemperda dan masing-masing fraksi dengan jumlah keseluruhan

16 orang dari target 5 orang pada tahun 2022. Secara khusus Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi kepada Anggota Dewan, Alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya bantuan tenaga ahli, kemampuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat lebih meningkat dan berkualitas sehingga menguasai materi muatan dan substansi peraturan dewan.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana mencapai 251,92% dari target 100%. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana meliputi pengadaan sarana prasarana tahun 2022 yang mencapai realisasi 91 jenis dari target 45 jenis dengan persentase realisasi sebesar 202,22% dan pemeliharaan sarana prasarana yang mencapai 40 unit dari target 7 unit dengan persentase realisasi sebesar 571,43%. Peningkatan realisasi drastis akibat adanya penambahan belanja sarana prasarana dan pemeliharaan sarana prasarana pada anggaran perubahan tahun 2022. Peningkatan pemenuhan layanan sarana dan prasarana diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kepuasan dan mempercepat proses kerja sehingga produktivitas kegiatan meningkat.

Pelayanan kehumasan dan keprotokolan kegiatan DPRD oleh sekretariat DPRD meliputi:

1. penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang informasi dan pemberitaan,
2. pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi; serta penyelenggaraan kebijakan bidang informasi dan pemberitaan,
3. pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi.

Jumlah Pelayanan dihitung dari jumlah terlaksananya pelayanan kehumasan dan keprotokolan terhadap rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan serta kegiatan

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD selama tahun 2022.

Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya terdiri dari jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan terealisasi 474 kali dari target 459 dan jumlah kegiatan ke protokolan yang difasilitasi terealisasi 295 kali dari target 255 kali. Total realisasi capaian keseluruhan mencapai 107% dari target 100%.

Kegiatan penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD tahun 2022 mencapai 88 kali dari target 50 kali dengan persentase realisasi sebesar 176% pada Tahun 2022 penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dilakukan melalui beberapa media cetak antara lain B.Post, Barito Pos, Radar Banjarmasin, Duta TV dan melalui media online lainnya.

Perhitungan persentase realisasi capaian sub indikator kinerja dan persentase realisasi capaian indikator kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian sub IKK} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun ke-n}}{\text{Jumlah target Tahun Ke-n}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian IKK} = \frac{\text{Jumlah Realiasi sub IKK tahun ke-n}}{\text{Jumlah Target sub IKK thn ke-n}} \times 100$$

**Tabel 16. Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat per Indikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)		
		2019	2020	2021	2022						
					Target	Realisasi	Capaian				
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Percentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	94,70%	94,04%	100%	100,23%	100,23%	100%	100,23		
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani (dokumen)	2639	2432	2415	2568	2574	100,23	2568	100,23		
	Percentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	320,00%	100%	320%	320%	100%	320		
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan (orang)	3	4	16	5	16	320%	5	320,00		
	Percentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	100%	114,28%	100%	251,92%	251,92%	100%	251,92		
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	80	50	45	45	91	202%	45	202,22		
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	43	7	9	7	40	571%	7	571,43		
	Percentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	89%	80%	66,29%	100%	67,37%	67,37%	100%	67,37		
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi (orang)	11	12	15	15	11	73,33	15	73,33		
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi (orang)	210	33	57	175	117	66,86	175	66,86		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya (orang)	33	0	32	35	32	91,43	35	91,43		
	Percentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	100%	166%	100%	107,70%	107,70%	100%	107,7		
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (kali)	-	592	561	459	474	103,27	459	103,27		
	Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi (kali)	53	248	337	255	295	115,686	255	115,69		
	Percentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	97,50%	127,19%	100%	176%	176%	100%	176		
	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspos (kali)	10	50	83	50	88	176	50	176,00		

#### 4. Analisis Program Penunjang

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 mengampu 2 program, 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 10.038.720.948.- (*Sepuluh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah.-*). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.590.768.725.- (*Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah.-*) dengan realisasi capaian persentase keuangan sebesar 75,61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 17. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>3.647.819.207</b>	<b>2.201.971.373</b>
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>		
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	336.000.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	466.744.776
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	1.126.384.097
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	272.842.500
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.390.901.741</b>	<b>5.388.797.352</b>
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000	101.948.786
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393	17.328.650
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	2.075.210.765
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	10.308.332
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	40.409.118
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	57.957.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	325.775.900
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	130.180.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	166.848.226
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851	153.256.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000	33.519.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534	137.780.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967	945.727.522
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	14.034.157
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	258.810.236
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	919.702.560
<b>JUMLAH</b>	<b>10.038.720.948</b>	<b>7.590.768.725</b>

## 5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja di Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD maka diperlukan sumberdaya (anggaran dan SDM) yang memadai yaitu Sumberdaya manusia yang kompeten, dan sumberdaya yang mencukupi serta sarana prasarana yang memadai.

Kondisi ideal di Bagian Umum Sekretariat DPRD jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan dalam analisa jabatan sebanyak 23 orang. Kondisi saat ini jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan sebanyak 12 orang. Masih dibutuhkan 11 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah menyampaikan usulan kekurangan jabatan yang ada ke BKPSDM untuk formasi jabatan CPNS/PPPK. Selain itu mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menaruh PTT/pegawai non PNS agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.

penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Adapun serapan Anggaran dari Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD dilihat pada tabel 15 diatas jumlah serapan sebesar 75,61%. Sisa dana terbesar ada pada pendalaman tugas DPRD dan sisa dana pengadaan barang dan belanja Modal. Sisa diakibatkan adanya efisiensi belanja.

### **1.1 Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian**

#### **a. Target dan Capaian IKU**

Sasaran strategis Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ada 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja. Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani mencapai 2.574 dokumen (100,23%) dari target 2.568 dokumen, Jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sebesar 11 orang (73,33%) dari target 15 orang, Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sebesar 117 orang (66,86%) dari target 175 orang, jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya terealisasi 32 orang (91,43%) dari target 35 orang serta jumlah tenaga ahli yang disediakan terealisasi 16 orang (320%) dari target 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.568 dokumen	2.574 dokumen	100,23%
2.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang	11 orang	73,33%
3.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang	117 orang	66,86%
4.	Melaksanakan fasilitasi pemeriksa kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang	32 orang	91,43%
5.	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang	16 orang	320%

**b. Uraian dan analisis Capaian IKU****1. Perbandingan Realisasi dengan Target**

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi kinerja dari target yang ditetapkan diperoleh data sebagai berikut:

- jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani mencapai 2.574 dokumen (100,23%) dari target 2.568 dokumen;
- Jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sebesar 11 orang (73,33%) dari target 15 orang;
- Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sebesar 117 orang (66,86%) dari target 175 orang;
- jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya terealisasi 32 orang (91,43%) dari target 35 orang; dan
- jumlah tenaga ahli yang disediakan terealisasi 16 orang (320%) dari target 5 orang.

**2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

Realisasi Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani dari tahun 2019 menurun pada tahun 2020 sebanyak 207 dokumen dan dari tahun 2020 ke 2021 menurun kembali sebanyak 17 dokumen. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 sebanyak 159 dokumen yaitu mencapai 2.574 dokumen.

Realisasi jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sejak tahun 2019 meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 yang terealisasi 100% dari target. Tahun 2022 tidak mencapai target. Realisasi hanya 11 orang dari target 15 orang atau dengan kata lain terealisasi hanya mencapai 73,33% dari target tahun 2022.

Realisasi jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sejak tahun 2019 menurun realisasinya sebanyak 210 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 57 orang,

meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah peningkatan sebanyak 24 orang dari realisasi tahun 2020 sebanyak 33 orang. Tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi yaitu mencapai 117 orang/kali dengan persentase capaian target 66,86 %, meningkat 60 orang atau 34,29% dibandingkan tahun 2021.

Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya pada tahun 2019 sebanyak 33 orang dan pada tahun 2020 tidak terealisasi sama sekali. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terealisasi sebanyak 32 orang dengan serapan 91,43% dari target.

Jumlah tenaga ahli DPRD yang tersedia pada tahun 2019 tersedia 3 orang dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 4 orang. Pada tahun 2021 dan 2022 terealisasi 16 tenaga ahli dengan persentase capaian 320%.

**Tabel 19. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.639 dokumen	2432 dokumen	2415 dokumen	2568 dokumen	2574 dokumen	100,23%
2.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	11 orang	12 orang	15 orang	15 orang	11 orang	73,33%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
3.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	210 kali	33 kali	57 orang	175 orang	117 orang	66,86%
4.	Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	33 orang	0 orang	32 orang	35 orang	32 orang	91,43%
5.	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	3 orang	4 orang	16 orang	5 orang	16 orang	320%

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani tahun 2022 merupakan data yang bersumber dari aktivitas organisasi yang bersumber dari kegiatan surat menyurat baik masuk maupun keluar serta dokumen kepegawaian yang dikelola. Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan administrasi dan kepegawaian Sekretariat DPRD di dukung dengan jumlah pegawai 87 orang yaitu terdiri dari 35 orang ASN, 36 orang PTT, 8 orang Tenaga Ahli AKD dan 8 orang Tenaga Ahli Fraksi. Adapun nama jabatan, eselon dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 20. Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Sekretaris	II b	0	0	0
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	III a	1	0	1
	Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	10	0	10
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	21	21
3	Kepala Bagian Keuangan	III a	1	0	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	6	0	6
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	6	6
4	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	III a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	6	0	6
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	9	9
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	8	0	8
6	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	-	0	8	8
7	Tenaga Ahli Fraksi	-	0	8	8
<b>JUMLAH</b>			<b>35</b>	<b>52</b>	<b>87</b>

Pegawai ASN lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebanyak 32 orang . Pegawai yang memiliki pangkat golongan 4 sebanyak 4 orang, golongan 3 sebanyak 18 orang, golongan 2 sebanyak 12 orang dan golongan 1 sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2022**

No.	Jenis Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	2
4	Pembina Tk. I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk.I	III/d	2
7	Penata	III/c	5
8	Penata Muda Tk.I	III/b	4
9	Penata Muda	III/a	6
10	Pengatur Tk.I	II/d	9
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0
13	Pengatur Muda Tk.I	II/a	1
14	Juru Tk I	I/d	1
15	Juru Tk I	I/c	0
16	Juru Muda Tk.I	I/b	0
17	Juru Muda	I/a	0
<b>JUMLAH</b>			<b>35</b>

Pendidikan terakhir pegawai sekretariat DPRD tahun 2022 dari 87 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sekolah dasar sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA/SMK sebanyak 29 orang, D3 sebanyak 8 orang, D4 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 35 orang dan master/pasca sarjana sebanyak 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 22. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2022**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2	-	2
2	SLTP	-	1	1
3	SLTA / SMK	12	17	29
4	D.1	-	-	0
5	D.2	-	-	0
6	D.3	2	6	8
7	D.4	2	-	2
8	Sarjana (S.1)	13	22	35
9	Master / Pasca Sarjana	4	6	10
10	Dokter / S3	-	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>52</b>	<b>87</b>

Dengan kondisi pegawai sebagaimana dijelaskan diatas, sangat diharapkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian kedepannya bisa lebih baik dan dapat lebih ditingkatkan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia.

Realisasi Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi tahun 2022 adalah merupakan kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana terlaksana sebanyak 117 orang/kali. Capaian kinerja belum optimal. Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka peningkatan kemampuan teknis DPRD Kabupaten Tanah Laut, karena kegiatan ini sangat penting terutama dalam rangka untuk menyikapi terhadap ketentuan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Realisasi Diklat / Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan aparatur ASN lingkup secretariat tercapai 73,33% yaitu 11 orang dari target. Untuk kedepannya semoga bisa lebih ditingkatkan lagi mengingat jumlah ASN yang melaksanakan diklat/bimteks baru mencapai 31,43% dari jumlah ASN sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD terealisasi 16 orang dari target 5 orang dengan persentase capaian 320%. Realisasi tenaga ahli yang disediakan tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan PP 18 tahun 2017. Adapun 16 orang tenaga ahli tersebut terdiri dari :

- 8 orang tenaga ahli AKD dengan rincian : 3 orang untuk Komisi I, Komisi II dan komisi III, Badan Anggaran sebanyak 1 orang dan Bapemperda 1 orang
- 8 orang tenaga ahli fraksi dengan rincian 1 orang per fraksi yaitu fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PKB dan Demokrat.

Realisasi Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya pada tahun 2022 sebanyak 32 orang dari 35 anggota DPRD. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2022 di lantai 3 ruang MCU RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.

#### **4. Analisis Program Penunjang**

Sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD tidak mengampu program/kegiatan.

#### **6. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada sub bagian tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD sebanyak 6 orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 4 orang. Masih dibutuhkan 2 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan analis tata laksana dan pengelola teknologi informatika. Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT /tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian tidak mengampu program kegiatan sehingga analisis efisiensi tidak dilaksanakan

## 2. Kepala Bagian Keuangan

### a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis di bagian keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Sekretariat DPRD. Target kinerja yang ditetapkan adalah katagori BB (sangat baik) . Realisasi indikator kinerja tahun 2022 memperoleh nilai SAKIP sebesar 79,5 dengan katagori BB (sangat baik) dengan demikian capaian target terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 23. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	BB (sangat Baik) 79,5	100

### b. Uraian dan analisis Capaian IKU

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2022 mencapai 100%.

#### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Nilai SAKIP sekretariat DPRD Tahun 2019 sampai dengan 2021 meningkat dari katagori B menjadi BB, walaupun tahun 2020 ke 2021 masih dikatagori BB namun dari segi nilai ada peningkatan sebesar 1,81 point. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai sebanyak 1,61 point dari tahun 2021 menjadi 79,5. Nilai juga masih dalam katagori

BB. Secara keseluruhan capaian target telah tercapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 24. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B 67,54	BB 76,08	BB 77,89	BB	BB 79,5	100

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan terutama di komponen perencanaan kinerja (0,11 point), pelaporan kinerja (0,53 point) dan evaluasi internal (1,29 point). Sedangkan penurunan nilai evaluasi ada pada komponen pencapaian kinerja (0,12 point). Untuk komponen pengukuran kinerja nilai evaluasi tetap tidak ada peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 25. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2022**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	TAHUN PENILAIAN		
		2020	2021	2022
1	Perencanaan kinerja	26,81	26,92	24
2	Pengukuran kinerja	19,38	19,38	24
3	Pelaporan kinerja	10,07	10,6	11,5
4	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	5,26	6,55	20
5	Pencapaian kinerja	14,56	14,44	-
<b>JUMLAH</b>		<b>76,08</b>	<b>77,89</b>	<b>79,5</b>

Predikat BB dengan nilai 79,5 maka Sekretariat DPRD dengan interpretasi SKPD yang akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Walaupun demikian ke 4 (empat) komponen penilaian masih dapat ditingkatkan dengan berusaha maksimal dalam meningkatkan peran serta dan perbaikan secara terus menerus agar tercapai predikat A (memuaskan) atau AA (sangat memuaskan).

Upaya yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan Nilai implementasi SAKIP Sekretariat DPRD ke depannya antara lain :

1. **Perencanaan Kinerja** ; meningkatkan kualitas perencanaan dengan tetap melakukan perbaikan/ penyempurnaan dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik; selain itu juga mempertahankan kegiatan monitoring rencana aksi secara berkala dari mulai esselon 2 sampai ke unit di bawahnya.
3. **Pengukuran Kinerja** ; melakukan reviu berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja dengan melibatkan stakeholder terkait
4. **Pelaporan Kinerja**; Dalam dokumen laporan kinerja akan menyajikan/menginformasikan:

- perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
  - perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Kabupaten/ Provinsi/ nasional;
  - menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja
4. **Evaluasi Kinerja:** Hasil evaluasi terhadap kinerja akan dilaksanakan atau dimanfaat untuk peningkatan kinerja SKPD. Adapun tindak lanjut ke depannya sebagai berikut:
- Hasil evaluasi AKIP internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - Hasil dari evaluasi AKIP internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
  - Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan di dokumentasikan secara lengkap sehingga pemanfaatannya dapat dimaksimalkan;
  - Rekomendasi hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh APIP segera di tindaklanjuti.

Realisasi dan target pencapaian indikator Kinerja kepala Bagian Keuangan dan indikator kinerja khusus pendukungnya pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Perhitungan persentase realisasi capaian sub indikator kinerja dan persentase realisasi capaian indikator kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian sub IKK} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun ke-n}}{\text{Jumlah target Tahun Ke-n}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian IKK} = \frac{\text{Jumlah Realisasi sub IKK tahun ke-n}}{\text{Jumlah Target sub IKK thn ke-n}} \times 100$$

**Tabel 26. Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Keuangan Perindikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)		
		2019	2020	2021	2022						
					Target	Realisasi	Capaian				
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B (baik) 67,54	BB (sangat Baik) 76,08	BB (sangat Baik) 77,89	BB (sangat Baik)	BB (sangat Baik) 79,5	100%	BB (sangat Baik)	100%		
	<i>Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD (dokumen)</i>	4	6	6	6	7	116,67	6	116,67		
	<i>Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan (dokumen)</i>	1930	2093	2357	1930	2323	120%	1930	120,36		
	<i>Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan (dokumen)</i>		85	91	60	155	258%	60	258,33		
	<i>Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan (laporan)</i>	7	7	7	7	7	100%	7	100,00		
	<i>Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan (dokumen)</i>	1930	2093	2357	1930	2323	120,36	1930	120,36		

#### 4. Analisis Program Penunjang

Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mengampu 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan jumlah Pagu Rp. 29.939.813.035,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 27.272.611.448.- (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua juta Enam Ratus Ssebelas Ribu Empat ratus Empat Puluh Delapan Rupiah.-*) atau dengan kata lain 91,09 % dari pagu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 27. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>29.939.813.035</b>	<b>27.272.611.448</b>	<b>91,09</b>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	17.586.898	13.133.100	74,68
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.053.614.428	4.466.601.769	88,38
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	39.987.385	24.898.300	62,27
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>			
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	24.756.352.220	22.740.993.779	91,86
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.272.104	26.984.500	37,34
<b>JUMLAH</b>	<b>29.939.813.035</b>	<b>27.272.611.448</b>	<b>91,09</b>

#### 5. Analisis Terhadap Penggunaan Sumberdaya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 17 orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 10 orang. Masih dibutuhkan 7 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan Pengelola Bahan Perencanaan 1 orang, Verifikator 2 orang, pengelola perjalanan dinas 1 orang, pengelola keuangan 1 orang,

pengelola laporan keuangan1 orang serta pengelola program dan laporan 1 orang. Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT /tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Serapan keuangan berdasarkan tabel 31 sebesar 91,09% dari pagu anggaran yang diampu bagian keuangan menggambarkan kemampuan Bagian Keuangan dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana serapan anggaran merupakan akumulasi dari serapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing PPTK dilingkup bagian keuangan. Berdasarkan realisasi keuangan 91,09% dan realisasi fisik sebesar 99,85% maka jumlah efisiensi anggaran sebesar 8,76%.

Sisa dana terbesar ada pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD serta Sisa dana yang diakibatkan adanya efisiensi belanja pada sub kegiatan lainnya.

## 2.1 Kasubbag Perencanaan dan Anggaran

### a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD. Target indicator kinerja tahun 2022 sebanyak 6 dokumen dengan realisasi sebanyak 7 dokumen dengan kata lain capaian kinerja mencapai 116,7%. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

- 1). Dokumen Renja Murni 2023;
- 2). Renja Perubahan 2022;
- 3). DPA murni 2022 (termasuk RKA);
- 4). DPA perubahan 2022 (termasuk RKA-P);
- 5). Penetapan Kinerja (PK) murni;
- 6). Penetapan Kinerja Perubahan; dan
- 7). Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) 2022

**Tabel 28. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen	7 dokumen	116,7	6 dokumen	116,7

## b. Uraian dan analisis Capaian IKU

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2022 mencapai 116,7%.

### 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian indikator kinerja sub bagian perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD tahun dibandingkan pada tahun 2019, terjadi peningkatan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sama-sama mencapai target kinerja dengan persentase capaian 100% dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 mencapai 116.7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 29. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian %
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	4	6	6	6	7	116,7
		dok	dok	dok	dok	dok	dok	

### **3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Realisasi Target Indikator Kinerja mencapai 100% pada tahun 2022 meliputi 1). dokumen renja murni, 2). renja perubahan, 3). DPA murni (termasuk RKA), 4). DPA perubahan (termasuk RKA-P), 5). penetapan kinerja (PK) murni 6). penetapan kinerja perubahan dan 7). Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) 2022.

Semua dokumen tersebut adalah dokumen yang harus tersedia dan tersusun dengan baik. Dokumen perencanaan dan penganggaran berisi rencana pendapat an, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

### **4. Analisis Program Penunjang**

Sub bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD mengampu 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun Jumlah Pagu kegiatan sebesar Rp. 72.272.104.- (*Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Rupiah.-*) dengan realisasi Rp. 26.984.500.- (*Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.-*) dengan kata lain persentase capaian keuangan 37,34%. Walaupun capaian keuangan sebesar 37,34% tetapi capaian fisik mencapai 100%.

**Tabel 30. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.272.104	26.984.500	37,34
<b>JUMLAH</b>	<b>72.272.104</b>	<b>26.984.500</b>	<b>37,34</b>

## 5. Analisis Terhadap Penggunaan Sumberdaya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD sebanyak 4 orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 3 orang. Masih dibutuhkan 1 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan Pengelola Bahan Perencanaan sebanyak 1 orang. Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT /tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Serapan keuangan berdasarkan tabel 30 sebesar 37,34% dari pagu anggaran yang diampu sub bagian Perencanaan dan anggaran menggambarkan kemampuan dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah direncanakan. Mengingat capaian output kegiatan terpenuhi 116.7% sekalipun serapan keuangan hanya mencapai 37,34%, perlu dilakukan penghitungan ulang dan cermat dalam menganggarkan dana pada sub kegiatan ini di tahun anggaran 2023 mengingat banyaknya dana yang tidak terserap.



**Gambar 2. Rapat Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Badan Anggaran dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 pada tanggal 9 Agustus 2022**

### 3. Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

#### a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis di bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD dengan 4 indikator kinerja dengan keseluruhan target indikator adalah 100%. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 untuk indikator persentase rapat yang difasilitasi 106,67 % dari target 100%, persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda 66,67% dari target 100%, persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi 66,67% dari target 100% dan persentase kegiatan reses yang dilaksanakan 100% dari target 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 31. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%	106,67	106,67
	2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100%	66,67	66,67
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	66,67	66,67
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100,00	100,00

#### b. Uraian dan analisis Capaian IKU

##### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2022 adalah 1 (satu) indikator kinerja mencapai sesuai target 100% dan 1 (satu) indikator yang melampaui target yaitu indikator kinerja persentase rapat yang difasilitasi (106,67%) dan 2 (dua) indikator persentase fasilitasi pembahasan rancangan perda dan Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi yang belum mencapai target yaitu sebesar 66,67%.

## 2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi dibandingkan tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar dari 97% menjadi 143,53% pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 sebesar 106,67%.

Realisasi persentase pembahasan rancangan Perda mengalami penurunan realisasi dari 2019 sebanyak 127% menjadi 100% pada tahun 2020 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 71,05%. Kondisi ini menurun lagi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 66,67%.

Realisasi persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 200% dari target 100%. Walaupun realisasi tahun 2021 menurun dibandingkan realisasi tahun 2020, tetapi capaian realisasi tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, capaian realisasi menurun lagi dan hanya mencapai 66,67%

Realisasi persentase kegiatan reses yang dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sesuai dengan target kinerja yaitu mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 32. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase rapat yang difasilitasi	97%	97,25%	131,76%	100%	106,67%	131,76%
		Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	127%	100%	71,05%	100%	66,67%	71,05%
		Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	200%	100%	100%	66,67%	100%
		Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2021 sebesar 143,53% menjadi 106,67 % pada tahun 2022. Penurunan sebesar 36,86% dari target. Walaupun menurun dibandingkan tahun 2021 secara umum target terpenuhi dan terlampaui.



**Gambar 3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum RT dan RW Kelurahan se-Kecamatan Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2022**

Realisasi persentase pembahasan rancangan Perda mengalami penurunan realisasi dari 100% pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,05% dan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 66,67%. Realisasi persentase pembahasan Raperda terdiri dari persentase capaian jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi dan persentase capaian jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu. Penurunan capaian sebesar 4,38% hal ini dikarenakan capaian jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi hanya mencapai 9 perda dari 15 raperda yang ditargetkan.

Ada beberapa Raperda berdasarkan pertimbangan Bapemperda menunda pembahasan hingga pengusul (SKPD) selesai melakukan perbaikan dan penyempurnaan naskah Akademik dan draf Raperdanya.



**Gambar 4. Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propomperda) Kabupaten Tanah Laut, 16 November 2022**

Realisasi persentase kegiatan reses yang dilaksanakan tahun 2022 sesuai dengan target kinerja yaitu mencapai 100%. Pelaksanaan reses anggota DPRD sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Februari, Juli dan Desember.

Realisasi persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi tahun 2022 menurun dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 33,33%. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD (komisi I, Komisi II dan Komisi III) dalam hal ini berkaitan dengan stake holder dan instansi/SKPD terkait.



**Gambar 5. Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 17 Mei 2022**

Untuk lebih jelasnya, perbandingan realisasi dan target capaian IKU Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD tahun 2019 sd. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 33. Realisasi Dan Target Capaian IKU Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2019 sd. 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	<i>Persentase rapat yang difasilitasi</i>	97%	97,25%	131,76%	100%	106,67%	106,67%
		<i>Jumlah Rapat yang difasilitasi</i>	208	248	366	255	272	106,67
		<i>Jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi</i>	4	4	21	4	4	100,00
		<i>Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda</i>	127%	100%	71,05%	100%	66,67%	66,67%
		<i>Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi</i>	14	11	8	15	9	60,00
		<i>Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu</i>	3	3	3	3	3	100,00
		<i>Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi</i>	100%	200%	100%	100%	66,67%	66,67%
		<i>Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi</i>	4	12	6	6	4	66,67
		<i>Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan</i>	2	3	3	3	3	100,00

#### 4. Analisis Program Penunjang

Bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mengampu 2 program 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan Jumlah pagu kegiatan Rp. 23.416.265.834.- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.264.288.651.- (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah.-*)

dengan persentase realisasi keuangan 65,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 34. Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU ANGGARAN
		KEUANGAN	%	
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>22.583.967.109</b>	<b>14.492.291.651</b>	<b>64,17</b>	<b>8.091.675.458</b>
<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>				
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	14.048.620.198	9.343.527.565	66,51	4.705.092.633
<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>				
Pembahasan APBD	94.394.280	38.438.200	40,72	55.956.080
<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>				
<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	85.760.449	3.567.000	4,16	82.193.449
<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	6.997.821.500	4.251.080.386	60,75	2.746.741.114
<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	9.796.309	2.645.800	27,01	7.150.509
<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	205.878.503	155.566.200	75,56	50.312.303
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				
<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	67.398.169	14.827.700	22,00	52.570.469
<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>				
<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	1.074.297.701	682.638.800	63,54	391.658.901
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>832.298.725</b>	<b>771.997.000</b>	<b>92,75</b>	<b>60.301.725</b>
<i>Layanan Administrasi DPRD</i>				
<i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	33.554.289	9.423.000	28,08	24.131.289
<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	798.744.436	762.574.000	95,47	36.170.436
<b>JUMLAH</b>	<b>23.416.265.834</b>	<b>15.264.288.651</b>	<b>65,19</b>	<b>8.151.977.183</b>

## 5. Analisis Terhadap Penggunaan Sumberdaya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD sebanyak 14(empat belas) orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 11 orang. Masih dibutuhkan 3 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan Analis Hukum 1 (satu) orang, pengadministrasi rapat 1 (satu) orang dan Notulis rapat 1 (satu) orang.

Untuk mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT/tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Serapan keuangan berdasarkan tabel 45 sebesar 65,19% dari pagu anggaran yang diampu Bagian Fasilitasi Tugas dan fungsi DPRD menggambarkan kemampuan dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Tabel 44, rata-rata persentase keseluruhan realisasi indikator Kinerja Kepala Bagian Umum fasilitasi tugas dan fungsi DPRD sebesar 84,83% dengan realisasi keuangan sebesar 65,19% maka terjadi efisiensi anggaran 19,64%.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni tahun 2022 sebesar Rp.61.202.812.673.-. Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui DPA-P 2022 menjadi Rp. 63.394.799.817,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.531.416,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,03 % dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 13.293.268.401,- (20,97%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 35. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening	URAIAN	PAGU MURNI 2022	PAGU PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	
				Rp.	%
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>61.202.812.673</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>50.101.531.416</b>	<b>79,03</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.199.733.003</b>	<b>62.045.658.275</b>	<b>49.007.708.374</b>	<b>78,99</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	29.589.966.648	29.809.966.648	27.207.565.548	91,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.609.766.355	32.235.691.627	21.800.142.826	67,63
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.003.079.670</b>	<b>1.349.141.542</b>	<b>1.093.823.042</b>	<b>81,08</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.316.723	684.722.903	581.777.042	84,97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	589.762.947	664.418.639	512.046.000	77,07

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebesar Rp 62.045.658.275 terealisasi belanja sebesar Rp. 49.007.708.374 (78,99%). Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.349.141.542 dengan realisasi sebesar Rp. 1.093.823.042 (81,08%).

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dari 35 sub kegiatan yang ada, 6 sub kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 50%.

Untuk lebih jelasnya realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan pada pos belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 36. Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja berdasarkan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK	FISIK TTB (%)	KEUANGAN	
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	<b>26.231.786.316</b>	<b>16.694.263.024</b>		<b>33,56</b>	<b>63,64</b>	<b>9.537.523.292</b>
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>						
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	14.048.620.198	9.343.527.565	84,00	19,28	66,51	4.705.092.633
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>						
Pembahasan APBD	94.394.280	38.438.200	43,07	0,07	40,72	55.956.080
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>						
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	3.567.000	59,33	0,08	4,16	82.193.449
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	4.251.080.386	68,00	7,77	60,75	2.746.741.114
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	2.645.800	65,00	0,01	27,01	7.150.509
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	155.566.200	98,00	0,33	75,56	50.312.303
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>						
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	14.827.700	75,00	0,08	22,00	52.570.469
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	336.000.000	90,00	0,60	82,86	69.495.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	466.744.776	78,00	0,99	59,97	311.516.939
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	1.126.384.097	75,00	2,65	52,04	1.038.040.903
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	272.842.500	95,00	0,47	91,06	26.794.992
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	682.638.800	70,00	1,23	63,54	391.658.901

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK	FISIK TTB (%)	KEUANGAN	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>37.163.013.501</b>	<b>33.407.268.392</b>		<b>59,77</b>	<b>89,89</b>	<b>3.755.745.109</b>
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>						
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	323.500.000	101.948.786	55,00	0,29	31,51	221.551.214
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	17.586.898	13.133.100	95,00	0,03	74,68	4.453.798
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.053.614.428	4.466.601.769	100,00	8,26	88,38	587.012.659
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	39.987.385	24.898.300	98,33	0,06	62,27	15.089.085
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>						
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	29.591.393	17.328.650	96,33	0,05	58,56	12.262.743
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2.141.497.250	2.075.210.765	98,00	3,43	96,90	66.286.485
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	11.304.939	10.308.332	99,00	0,02	91,18	996.607
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	24.586.745	14.301.710	100,00	0,04	58,17	10.285.035
<i>Layanan Administrasi DPRD</i>						
<i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	33.554.289	9.423.000	77,50	0,04	28,08	24.131.289
<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	798.744.436	762.574.000	100,00	1,31	95,47	36.170.436
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>						
<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	70.000.000	57.957.000	100,00	0,11	82,80	12.043.000
<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	405.193.250	325.775.900	100,00	0,66	80,40	79.417.350
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	24.756.352.220	22.740.963.779	100,00	40,45	91,86	2.015.388.441
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	202.500.720	130.180.000	80,00	0,26	64,29	72.320.720

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK	FISIK TTB (%)	KEUANGAN	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	234.833.680	166.848.226	80,00	0,31	71,05	67.985.454
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	215.925.851	153.256.300	78,00	0,28	70,98	62.669.551
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	66.670.000	33.519.800	55,00	0,06	50,28	33.150.200
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	190.939.534	137.780.000	80,00	0,25	72,16	53.159.534
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.172.858.967	945.727.522	90,00	1,72	80,63	227.131.445
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	16.241.100	14.034.157	100,00	0,03	86,41	2.206.943
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	311.290.912	258.810.236	95,00	0,48	83,14	52.480.676
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	973.967.400	919.702.560	99,57	1,58	94,43	54.264.840
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.272.104	26.984.500	41,00	0,05	37,34	45.287.604
<b>JUMLAH</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>50.101.531.416</b>		<b>93,33</b>	<b>79,03</b>	<b>13.293.268.401</b>

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 27.207.565.548.- dengan rincian Belanja gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 4.466.601.769.- dan belanja gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 22.740.963.779.- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

**Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	4.466.601.769	587.012.659	88,38
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.756.352.220	22.740.963.779	2.015.388.441	91,86
Jumlah	<b>29.809.966.648</b>	<b>27.207.565.548</b>	<b>2.602.401.100</b>	<b>91,27</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 21.800.142.826.- atau 67,63 % dari pagu anggaran tahun 2022 Rp. 32.235.691.627. dengan sisa anggaran Rp. 10.435.548.801 atau 32,37 % dari pagu. Adapun Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2022 secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
Belanja Barang dan Jasa	<b>32.235.691.627</b>	<b>21.800.142.826</b>	67,63	10.435.548.801
Belanja Barang	<b>3.314.022.809</b>	<b>2.390.032.405</b>	72,12	923.990.404
Belanja Barang Pakai Habis	3.314.022.809	2.390.032.405	72,12	923.990.404
<b>Belanja Jasa</b>	<b>4.648.995.672</b>	<b>3.330.246.296</b>	<b>71,63</b>	<b>1.318.749.376</b>
Belanja Jasa Kantor	2.813.310.912	2.178.946.736	77,45	634.364.176
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.567.400	4.502.560	59,50	3.064.840
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	116.516.700	54.478.000	46,76	62.038.700
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	306.600.660	172.280.000	56,19	134.320.660
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	195.000.000	148.539.000	76,17	46.461.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.210.000.000	771.500.000	63,76	438.500.000
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>530.135.710</b>	<b>255.278.326</b>	<b>48,15</b>	<b>274.857.384</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.140.000	125.098.326	43,42	163.041.674
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241.995.710	130.180.000	53,79	111.815.710
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.742.537.436</b>	<b>15.824.585.799</b>	<b>66,65</b>	<b>7.917.951.637</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.742.537.436	15.824.585.799	66,65	7.917.951.637

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 581.777.042.- atau 84,97 % dari pagu Rp. 684.722.903.- dengan jenis belanja pengadaan Belanja Modal Alat Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>684.722.903</b>	<b>581.777.042</b>	84,97	102.945.861
Belanja Modal Alat Besar	8.982.050	-	-	8.982.050
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	319.942.124	251.854.703	78,72	68.087.421
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.430.000	-	-	14.430.000
Belanja Modal Komputer	302.518.729	257.172.339	85,01	45.346.390
Belanja Modal Peralatan Olahraga	38.850.000	36.100.000	92,92	2.750.000

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 512.046.000.- atau 77,07 % dari pagu Rp. 664.418.639. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>664.418.639</b>	<b>512.046.000</b>	<b>77,07</b>	<b>152.372.639</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	664.418.639	512.046.000	77,07	152.372.639
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	664.418.639	512.046.000	77,07	152.372.639

## 2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD memiliki pagu Anggaran sebesar Rp. 26.231.786.316.- dengan realisasi belanja sebesar Rp.16.694.263.024.- Persentase capaian keuangan sebesar 63,64% dan realisasi fisik tertimbang sebesar 33,56% dari target indikator kinerja keseluruhan Tahun 2022.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 37.163.013.501.- dengan realisasi belanja Rp. 33.407.268.392.-.Persentase Capaian Keuangan sebesar 89,89% dan realisasi fisik tertimbang sebesar 59,77% dari target indikator kinerja keseluruhan Tahun 2022.

Secara keseluruhan Sekretariat DPRD memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 63.394.799.817.- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.531.416.- atau dengan kata lain realisasi keuangan sebesar 79,03%. Persentase capaian fisik tertimbang sebesar 93,33% dari target indikator kinerja keseluruhan Tahun 2022.

**Tabel 41. Program, Pagu dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE		SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK TBB%	KEUANGAN	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	26.231.786.316	16.694.263.024	33,563	63,64	9.537.523.292
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.163.013.501	33.407.268.392	59,771	89,89	3.755.745.109
<b>JUMLAH</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>50.101.531.416</b>	<b>93,33</b>	<b>79,03</b>	<b>13.293.268.401</b>

### 3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2020 terdapat 5 program dan 18 kegiatan dan pada tahun 2021 menjadi 2 program, 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Pada tahun 2022 menjadi 2 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Pagu tahun 2021 sebesar Rp. 69.248.368.264.- dengan realisasi belanja Rp.45.174.057.250.- atau dengan kata lain capaian realisasi keuangan sebesar 65,23%. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pagu menurun dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 63.394.799.817.- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.531.416.- meningkat 4.927.474.166 dibandingkan tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ; pagu pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pagu dan realisasi tahun 2022 namun realisasi belanja mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2022**

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		b. -
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		c. -
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		d. -
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		e. -
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		f. -
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		g. -
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		b. -
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		e. -
	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		f. -

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		g. -
	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		h. -
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		a. -
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	a. Pengadaan Mebel		a. -
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		a. -
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>
	a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>
	a. Fasilitasi Fraksi DPRD		a. Fasilitasi Fraksi DPRD
	b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>
	a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
	<b><i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i></b>		<b><i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i></b>
	a. Pembahasan KUA dan PPAS		a. -
	b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		b. -
	c. Pembahasan APBD		c. Pembahasan APBD
	d. Pembahasan APBD Perubahan		d. -
	e. Pembahasan Laporan Semester		e. -
	f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		f. -
	<b><i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i></b>		<b><i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i></b>
	a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		a. -
	b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		b. -
	c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		c. -
	d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		d. -
	e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		e. -
	f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		f. -
	g. Pengawasan Penggunaan Anggaran		g. Pengawasan Penggunaan Anggaran
	<b><i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i></b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i></b>
	a. Bimbingan Teknis DPRD		a. Pendalaman Tugas DPRD
	b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan		b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		e.
	f. Penyusunan Program Kerja DPRD		f.
	<b><i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i></b>		<b><i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i></b>
	a. Kunjungan Kerja dalam Daerah		a. -
	b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	c. Pelaksanaan Reses		c. -
	<b><i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i></b>		
	a. Pengawasan Kode Etik DPRD		
	<b><i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i></b>		
	a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		
	b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
	<b><i>Fasilitasi Tugas DPRD</i></b>		<b><i>Fasilitasi Tugas DPRD</i></b>
	a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		b. -
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
<b>2 Program</b>	<b>18 Kegiatan dan 68 sub kegiatan</b>	<b>2 Program</b>	<b>15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan</b>
<b>Total Anggaran</b>		<b>Total Anggaran</b>	
Rp. 69.248.368.264.-		Rp. 63.394.799.817.-	
<b>Realisasi</b>		<b>Realisasi</b>	
Rp. 45.174.057.250.-		Rp. 50.101.531.416.-	

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran Indikator kinerja utama yakni meningkatnya kinerja layanan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, dengan indikator utama tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dapat dicapai dengan nilai BAIK (78,26) dari target BAIK (77,10).

Dengan Laporan Kinerja (LKj) diharapkan dapat memperjelas atau memberi gambaran sampai sejauh mana program yang tertuang dalam Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan ini dilaksanakan untuk evaluasi kegiatan dan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

### **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2022 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana;
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil

- yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten;
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai;
  6. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada indikator indeks kepuasan;
  7. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat DPRD dan pembahasan raperda.
  8. Menyediakan tenaga ahli DPRD, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama tenaga ahli Fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, sehingga upaya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dapat tercapai.
  9. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya manusia Sekretariat DPRD, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi terhadap bidang tugas baik DPRD maupun Sekretariat DPRD. Misalnya melalui kegiatan workshop, bimtek , seminar, lokakarya, kunjungan kerja, dll.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR :  
TANGGAL :

### Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Kabupaten : Tanah Laut  
Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Tugas :  
Menyelenggarakan administrasi kkesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :  
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama / Outcome/Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD)	Sekretariat DPRD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

Ttd

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA



ALFIRIAL, SH, MM  
NIP.19750203 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SEKRETARIAT DPRD

# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari  
Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009 Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFARIN, S.IP, M.Si

N I P : 19690426 199010 1 001

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA  
Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANAH LAUT,

SAFARIN, S.IP, M.Si  
NIP. 19690426 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD**  
**Penanggungjawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun Anggaran : 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Baik (77,10)	IKM

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
SEKRETARIAT DPRD	63.394.799.817	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.163.013.501	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.272.104	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	APBD-P
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.111.188.711	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	APBD-P
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	APBD-P
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	APBD-P
Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	323.500.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000	APBD-P
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.206.980.327	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	APBD-P
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	APBD-P
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393	APBD-P
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	APBD-P
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.172.858.967	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967	APBD-P
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.499.412	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	APBD-P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	APBD-P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	APBD-P
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.869.785	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	APBD-P
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851	APBD-P

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	APBD-P
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>25.231.545.470</b>	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	APBD-P
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	APBD-P
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	APBD-P
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>832.298.725</b>	
Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	APBD-P
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	APBD-P
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>26.231.786.316</b>	APBD-P
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>7.299.256.761</b>	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	APBD-P
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	APBD-P
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	APBD-P
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	APBD-P
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>94.394.280</b>	
Pembahasan APBD	94.394.280	APBD-P
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>67.398.169</b>	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	APBD-P
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>3.647.819.207</b>	
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	APBD-P
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	APBD-P
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	APBD-P
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	APBD-P
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.074.297.701</b>	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	APBD-P
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>14.048.620.198</b>	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022



# Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

## Eselon III



### Sekretaris DPRD

- Kabag Umum dan Humas
- Kabag Keuangan
- Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Anang Ifansyah, ST  
NIP : 19730217 200801 1 009  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Safarin, S.IP, M.Si  
NIP : 19690426 199010 1 001  
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Umum dan  
Hubungan Masyarakat,

Anang Ifansyah, ST  
NIP. 19730217 200801 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut**  
**Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat**  
**Tahun Anggaran : 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi	1 Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaiannya yang tertib	100	%
		2 Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100	%
		3 Persentasi pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100	%
		4 Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100	%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	1 Persentasi kegiatan DPRD yang terlaiyani kehumasan dan keprotokolannya	100	%
		2 Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>10.038.720.948</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.390.901.741</b>	APBD-P
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>323.500.000</b>	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000	APBD-P
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.206.980.327</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	APBD-P
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	APBD-P
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393	APBD-P
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	APBD-P
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.172.858.967</b>	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967	APBD-P
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.301.499.412</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	APBD-P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	APBD-P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	APBD-P
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>910.869.785</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	APBD-P
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851	APBD-P
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	APBD-P
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>475.193.250</b>	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	APBD-P
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	APBD-P
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>3.647.819.207</b>	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>3.647.819.207</b>	
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	APBD-P
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	APBD-P
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	APBD-P
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	APBD-P



Pelaihari, Oktober 2022  
 Kepala Bagian Umum dan Humas  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST  
 NIP. 19730217 200801 1 009



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, MAP  
NIP : 19710224 199702 1 003  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten  
Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Safarin, S.IP, M.Si  
NIP : 19690426 199010 1 001  
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Tanah Laut,  
  
Safarin, S.IP, M.Si  
NIP. 19690426 199010 1 001

Kepala Bagian Keuangan,  
  
H. Achmad Taufik, S.Pd, MAP  
NIP. 19710224 199702 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah** : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
**Penanggungjawab** : Kepala Bagian Keuangan  
**Tahun Anggaran** : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Sangat Baik

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>29.939.813.035</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>37.163.013.501</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>72.272.104</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	APBD-P
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.111.188.711</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	APBD-P
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	APBD-P
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	APBD-P
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>24.756.352.220</b>	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	APBD-P



Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP  
 NIP. 19710224 199702 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Kaisar Muslim, SH  
NIP : 19671007 199803 1 004  
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat  
DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Safarin, S.IP, M.Si  
NIP : 19690426 199010 1 001  
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan  
Fungsi DPRD,

**Kaisar Muslim, SH**

NIP. 19671007 199803 1 004

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Tanah Laut,  
  
Safarin, S.IP, M.Si  
NIP. 19690426 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Penanggungjawab  
Tahun Anggaran**

**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
: Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
: 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1 Persentasi rapat yang difasilitasi	100	%
		2 Persentasi fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100	%
		3 Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100	%
		4 Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>23.416.265.834</b>	
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>22.583.967.109</b>	
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>7.299.256.761</b>	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	APBD-P
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	APBD-P
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	APBD-P
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	APBD-P
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>94.394.280</b>	
Pembahasan APBD	94.394.280	APBD-P
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>67.398.169</b>	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	APBD-P
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.074.297.701</b>	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	APBD-P
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>14.048.620.198</b>	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	APBD-P
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>832.298.725</b>	
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>832.298.725</b>	
Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	APBD-P
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	APBD-P



Pelaihari, Oktober 2022  
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

**Kaisar Muslim, SH**  
NIP. 19671007 199803 1 004

# Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

## Bagian Umum dan Humas



### Kabag Umum dan Humas

- Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
- Analis Kebijakan Muda
- Pranata Hubungan Masyarakat Muda



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : [setdprd.tala@gmail.com](mailto:setdprd.tala@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Norhayati, S.St.Pi  
NIP : 19770502 200903 2 007  
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST  
NIP : 19730217 200801 1 009  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan  
Hubungan Masyarakat,

Anang Ifansyah, ST  
NIP. 19730217 200801 1 009

Kasubbag Tata Usaha dan  
Kepegawaian,

Norhayati, S.St.Pi  
NIP. 19770502 200903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Penanggungjawab  
Tahun Anggaran**

**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
: Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian  
: 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.568	Dokumen (surat/berkas)
2	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	15	Orang
3	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi	175	Orang
4	Melaksanakan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaan Kesehatannya	35	Orang
5	Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan tenaga Ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5	Orang

Kepala Bagian Umum dan Humas  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST  
NIP. 19730217 200801 1 009

Pelaihari, Januari 2022  
Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Norhayati, S.Si, Pi  
NIP. 19770502 200903 2 007



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Ahmad Yanuar, ST  
NIP : 19660102 199303 1 008  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda selaku sub koordinator rumah tangga  
dan perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST  
NIP : 19730217 200801 1 009  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan  
Hubungan Masyarakat,

Anang Ifansyah, ST  
NIP. 19730217 200801 1 009

Analis Kebijakan Muda selaku sub  
koordinator rumah tangga dan  
perlengkapan,

Ahmad Yanuar, ST  
NIP. 19660102 199303 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Penanggungjawab**  
**Tahun Anggaran**

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
: Analis Kebijakan Muda selaku sub koordinator rumah tangga dan perlengkapan  
: 2022

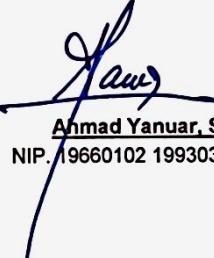
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf	
2	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf	
3	Melakukan advokasi kebijakan	Jumlah laporan advokasi kebijakan	5 laporan	
<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN</b>				
1	Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan 2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	40 7	Jenis kali

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan Sekretariat DPRD Kabupaten  
 Tanah Laut,  
 Hubungan Masyarakat

  
**Anang Ifansyah, ST**  
 NIP. 19730217 200801 1 009

Analis Kebijakan Muda selaku sub koordinator rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

  
**Ahmad Yanuar, ST**  
 NIP. 19660102 199303 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nove Noor Salam, SH  
NIP : 19861123 201502 1 002  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Muda selaku sub koordinator Hubungan masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST  
NIP : 19730217 200801 1 009  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan  
Hubungan Masyarakat,

Anang Ifansyah, ST

NIP. 19730217 200801 1 009

Pranata Hubungan Masyarakat Muda  
selaku sub koordinator Hubungan  
masyarakat dan protokol,

Nove Noor Salam, SH

NIP. 19861123 201502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah** : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
**Penanggungjawab** : Pranata Hubungan Masyarakat Muda  
**Tahun Anggaran** : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Menyusun Konsep pengembangan model layanan informasi dan	Jumlah Laporan konsep model pelayanan informasi kehumasan	4 laporan	
2	Mengikuti Rapat Pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Kehumasan	Mengikuti Rapat Pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Kehumasan	24 laporan	
3	Mengevaluasi Program pelayanan informasi dan kehumasan	Jumlah Laporan evaluasi pelayanan Informasi kehumasan yang terpublikasikan	12 laporan	
4	Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pidato	Jumlah Bahan naskah pidato yang terlayani	45 Naskah	
5	Mengikuti Kunjungan Kerja Atau acara Pimpinan/Anggota DPRD	Jumlah Laporan kunjungan kerja/acara seremonial Pimpinan	24 Laporan	
6	Terlaksananya pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan,	Jumlah Laporan kunjungan kerja/acara seremonial Pimpinan	12 laporan	
		Menyusun petunjuk teknis pelayanan komunikasi dan informasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dok	
7	Mengelola isu publik	Menyusun rancangan pers release kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	12 laporan	
<b>A KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT, PROTOKOL dan PUBLIKASI</b>				
1	Melaksanakan Penyebarluasan informasi / pemberitaan DPRD	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekpose	50	kali
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kehumasan dan keprotokolan	1 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 2 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi	459 255	kali

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan  
 Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten  
 Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST  
 NIP. 19730217 200801 1 009

Pranata Hubungan Masyarakat Muda selaku sub koordinator Hubungan  
 masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Nove Noor Salam, SH  
 NIP. 19801123 201502 1 002

# Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

## Bagian Keuangan



### Kabag Keuangan

- Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Zikri Fahma, SE, M.A.P  
NIP : 19750401 201001 1 010  
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Anggaran  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP  
NIP : 19710224 199702 1 003  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

**H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP**  
NIP. 19710224 199702 1 003

Kasubbag Perencanaan dan

**Zikri Fahma, SE, M.A.P**  
NIP. 19750401 201001 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah** : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
**Penanggungjawab** : Kasubbag Perencanaan dan Anggaran  
**Tahun Anggaran** : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6	Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	72.272.104	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.272.104	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.272.104	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	APBD-P

Kepala Bagian Keuangan  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



**H. Achmad Taufik, S.Pd, M.A.P.**  
 NIP. 19710224 199702 1 003

Pelaihari, Oktober 2022  
 Kasubbag Perencanaan dan Anggaran  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



**Zikri Fahma, SE, M.A.P.**  
 NIP. 19750401 201001 1 010



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : [setdprd.tala@gmail.com](mailto:setdprd.tala@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Bintarti, SE  
NIP : 19730415 200701 2 024  
Jabatan : Analis Kuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub koordinator Perbendaharaan dan Verifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP  
NIP : 19710224 199702 1 003  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

**H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP**  
NIP. 19710224 199702 1 003

Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
Muda selaku sub koordinator  
Perbendaharaan dan Verifikasi,

  
**Bintarti, SE**  
NIP. 19730415 200701 2 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah** : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
**Penanggungjawab** : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan  
**Tahun Anggaran** : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Melakukan Pengolahan dan analisis data belanja daerah	Jumlah Laporan	12 laporan	
2	Melakukan Monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan	Jumlah Laporan	12 laporan	
3	Menyediakan informasi keuangan daerah	Jumlah Laporan	1 laporan	
4	Memverifikasi dan menspesifikasikan informasi keuangan daerah	Jumlah Laporan	12 laporan	
<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>				
1	Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1.930	Dokumen
		2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	60	Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	APBD-P
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	APBD-P
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	APBD-P

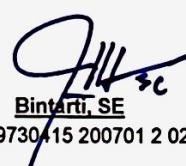
Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tanah Laut,



**H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP**  
NIP. 19710224 199702 1 003

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sekretariat DPRD Kabupaten  
Tanah Laut,



**Bintarti, SE**  
NIP. 19730415 200701 2 024



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sri Juana, S.Pi  
NIP : 19800118 200501 2 016  
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub Koordianor Akuntansi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP  
NIP : 19710224 199702 1 003  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP  
NIP. 19710224 199702 1 003

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub Koordianor Akuntansi dan Pelaporan,

Sri Juana, S.Pi  
NIP. 19800118 200501 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah** : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
**Penanggungjawab** : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda  
**Tahun Anggaran** : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemutakhiran data mengenai pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Laporan identifikasi, inventarisasi dan pemutakhiran data	1 laporan	
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1 laporan	
3	Menyusun makalah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah	Jumlah makalah	1 laporan	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>			
1	Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7	Laporan
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	1.930	dok

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tanah Laut,



H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP  
NIP. 19710224 199702 1 003

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub Koordinor Akuntansi  
dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



Sri Juana, S.Pi  
NIP. 19800118 200501 2 016

# Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

## Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD



### Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

- Perisalah Legislatif Muda
- Analis Kebijakan Muda
- Perisalah Legislatif Muda



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : [setdprd.tala@gmail.com](mailto:setdprd.tala@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Fahrian Nafarie, SH. MH  
NIP : 19810116 201101 1 002  
Jabatan : Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi Legislasi daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, S.H.  
NIP : 19671007 199803 1 004  
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

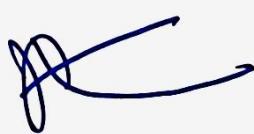
Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD,

Pelaihari, Oktober 2022  
Perisalah Legislatif Muda selaku sub  
koordinator fasilitasi Legislasi daerah,

  
**Kaisar Muslim, S.H.**  
NIP. 19671007 199803 1 004

  
**Fahrian Nafarie, SH. MH**  
NIP. 19810116 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Penanggungjawab**

**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut  
: Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi Legislasi daerah**

**Tahun Anggaran**

**: 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	merencanakan pembuatan validasi risalah	Validasi risalah	15 dokumen	
2	memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat	Validasi risalah	15 dokumen	
3	menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia	Risalah rapat	15 dokumen	
4	merencanakan penyusunan buku himpunan risalah dalam satu pokok pembahasan	Perencanaan himpunan risalah dalam satu pokok pembahasan	15 dokumen	
5	mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam satu pokok bahasan	Dokumen himpunan risalah rapat	15 dokumen	
6	menyusun daftar urutan risalah rapat resmi dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu kegiatan	Dokumen himpunan risalah rapat	15 dokumen	
7	menyusun buku himpunan risalah rapat	himpunan risalah rapat tercetak dalam bentuk buku	15 dokumen	
<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	Melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Raperda	Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi	15	Raperda

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	APBD-P
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	APBD-P
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	9.796.309	APBD-P
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

  
Kaisar Muslim, S.H.  
NIP. 19671007 199803 1 004

Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi Legislasi daerah  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

  
Fahrian Nafarie, SH. MH  
NIP. 19810116 201101 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gilang Pradana, S.STP  
NIP : 19891025 201010 1 001  
Jabatan : PPTK Sub Keg. Pembahasan APBD, Pengawasan Penggunaan Anggaran dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, S.H.  
NIP : 19671007 199803 1 004  
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD,

Kaisar Muslim, S.H.  
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, Oktober 2022

PPTK,

Gilang Pradana, S.STP  
NIP. 19891025 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

**Penanggungjawab**

: PPTK Sub Keg. Pembahasan APBD, Pengawasan Penggunaan Anggaran dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

**Tahun Anggaran**

: 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD</b>			
1	Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi	4	kali
		2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan	3	kali
2	Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat waktu	3	dokumen
		2 jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	6	dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
		Pembahasan APBD	88.607.213
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

PPTK Sub Keg. Pembahasan APBD, Pengawasan Penggunaan Anggaran dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD,

  
Kaisar Muslim, S.H.

NIP. 19671007 199803 1 004

  
Gilang Pradana, S.STP

NIP. 19891025 201010 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

# SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009  
Email : setdprd.tala@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gilang Pradana, S.STP  
NIP : 19891025 201010 1 001  
Jabatan : Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi tugas-tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, S.H.  
NIP : 19671007 199803 1 004  
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD,

Pelaihari, Oktober 2022  
Perisalah Legislatif Muda selaku sub  
koordinator fasilitasi tugas-tugas  
DPRD,

  
**Kaisar Muslim, S.H.**  
NIP. 19671007 199803 1 004

  
**Gilang Pradana, S.STP**  
NIP. 19891025 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Penanggungjawab**  
**Tahun Anggaran**

**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut**  
**: Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi tugas-tugas DPRD**  
**: 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A KINERJA UTAMA</b>				
1	Penyusunan risalah rapat dan dokumen kelengkapan risalah rapat	Jumlah dokumen	12 dokumen	
2	Penyusunan himpunan risalah rapat	Jumlah dokumen	3 dokumen	
<b>B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD</b>				
1	Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1 Jumlah Rapat yang difasilitasi	255	Rapat
2	Melaksanakan pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Jumlah Pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan	1.401	orang / kali

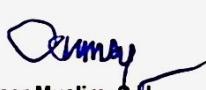
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Administrasi DPRD		
		Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	APBD-P
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	APBD-P
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi tugas-tugas DPRD  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

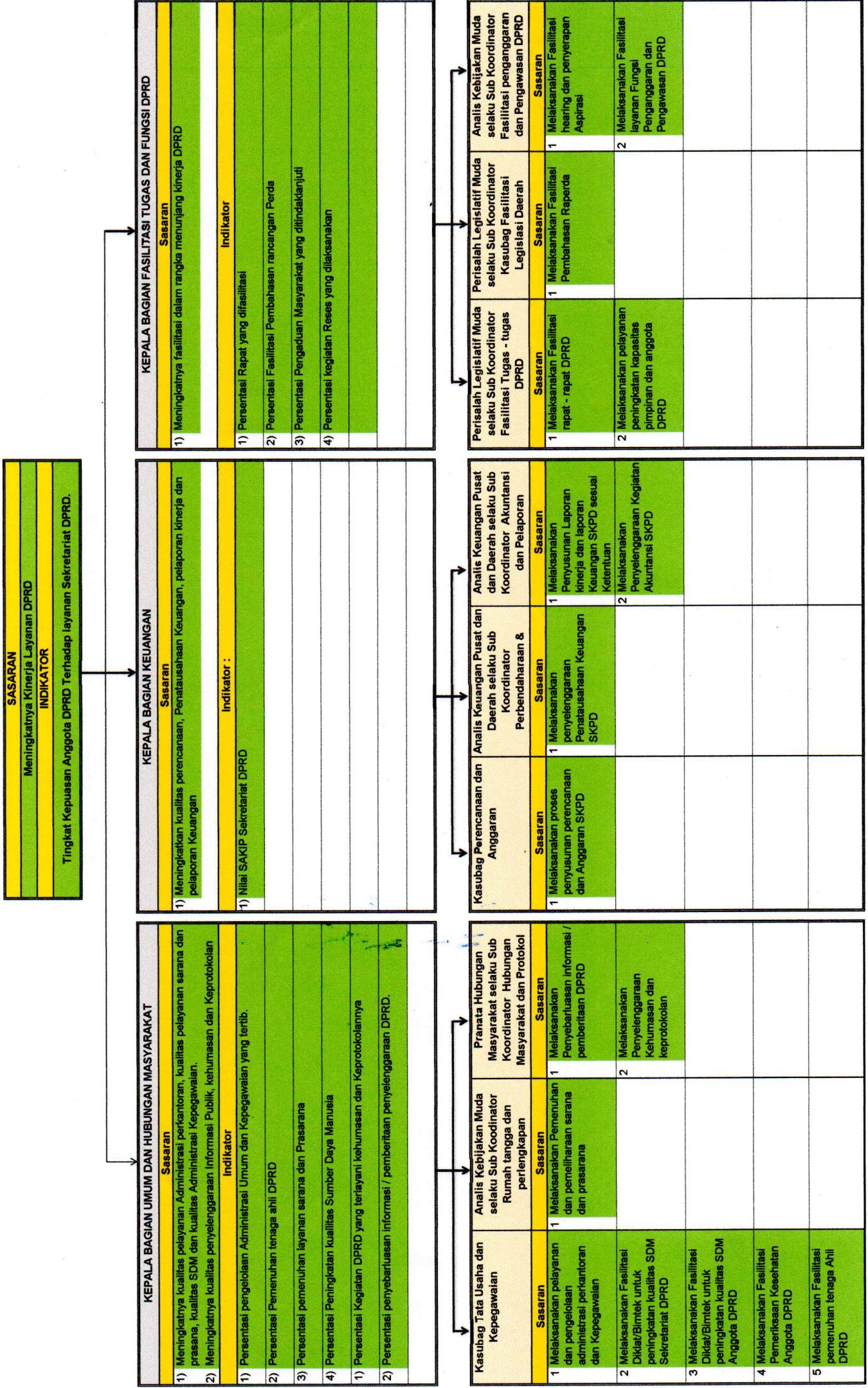
  
Kaisar Muslim, S.H.

NIP. 19671007 199803 1 004

  
Gilang Pradana, S.STP

NIP. 19891025 201010 1 001

**POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**  
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021



Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokument pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	1 Jumlah Pemberitaan DPRD yang diekspose	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	2 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan

Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokument pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	1 Jumlah Pemberitaan DPRD yang diekspose	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	2 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan
3 Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi		3 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi			3 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat
4 Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi					4 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi
5 Jumlah tenaga ahli yang disediakan					



Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokument pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	1 Jumlah Pemberitaan DPRD yang diekspose	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	2 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan
3 Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi		3 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi			3 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat
4 Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi					4 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi
5 Jumlah tenaga ahli yang disediakan					

## Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
							I				II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>Semuai Bidang</b>																									
		PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.163.013.501		9.541.767.745		6.015.737.208		8.737.158.079		9.112.675.360		33.407.338.392		89,89%		33.407.338.392		0,00%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	0,00	-	0,00	-	100	72.272.104	33	2.467.500	33	-	56	11.058.400	-	13.458.600	-	26.984.500	0,00%	37,34%	0,00	26.984.500	0,00%	0,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* (%)	0,00	-	0,00	-	9	72.272.104	3	2.467.500	2	-	2	11.058.400	2	13.458.600	9	26.984.500	100,00%	37,34%	9,00	26.984.500	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	5.111.188.711	30	945.524.802	55	1.162.406.057	90	1.231.254.919	-	1.165.447.391	-	4.504.633.169	0,00%	88,13%	0,00	4.504.633.169	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Pengasilan ASN (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	5.053.614.428	3	945.524.802	6	1.146.702.257	9	1.216.078.919	12	1.158.295.791	12	4.466.601.769	100,00%	88,38%	12,00	4.466.601.769	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	81	17.586.898	33	-	72	6.493.500	109	-	155	6.639.600	155	13.133.100	191,36%	74,68%	155,00	13.133.100	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun* (dokumen)	0,00	-	0,00	-	347	39.987.385	87	-	107	9.210.300	86	15.176.000	67	512.000	347	24.898.300	100,00%	62,27%	347,00	24.898.300	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepengawahan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepengawahan Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	323.500.000	-	84.937.996	45	-	50	7.231.010	-	9.779.780	-	101.948.786	0,00%	31,51%	0,00	101.948.786	0,00%	0,00%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* (orang)	0,00	-	0,00	-	20	323.500.000	9	84.937.996	10	-	11	7.231.010	11	9.779.780	11	101.948.786	55,00%	31,51%	11,00	101.948.786	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	0,00	-	0,00	-	100	2.206.980.327	17	676.750.983	58	540.281.494	-	373.022.299	-	527.134.681	-	2.117.189.457	0,00%	95,93%	0,00	2.117.189.457	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	13	11.304.939	1	1.380.000	2	8.928.332	13	-	13	-	13	10.308.332	100,00%	91,18%	13,00	10.308.332	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	21	24.586.745	-	-	-	-	-	13.469.710	21	832.000	21	14.301.710	100,00%	58,17%	21,00	14.301.710	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	12	29.591.393	-	-	2	16.174.650	12	1.154.000	12	-	12	17.328.650	100,00%	58,56%	12,00	17.328.650	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	0,00	-	0,00	-	75	2.141.497.250	17	675.370.983	139	515.178.512	243	358.398.589	472	526.302.681	472	2.075.250.765	629,33%	96,91%	472,00	2.075.250.765	0,00%	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tetap waktu* (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.172.858.967	-	112.285.793	53	125.179.649	-	289.773.000	-	418.489.080	53	945.727.522	52,90%	80,63%	52,90	945.727.522	0,00%	0,00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	17	1.172.858.967	3	112.285.793	9	125.179.649	12	289.773.000	14	418.489.080	14	945.727.522	82,35%	80,63%	14,00	945.727.522	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.301.499.412	-	275.821.515	35	304.661.727	75	304.137.942	-	307.925.769	-	1.192.546.953	0,00%	91,63%	0,00	1.192.546.953	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	311.290.912	3	59.564.475	6	59.536.930	9	70.828.002	12	68.880.829	12	258.810.236	100,00%	83,14%	12,00	258.810.236	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* (bulan)	0,00	-	0,00	-	27	16.241.100	-	-	5	6.399.157	20	-	27	7.635.000	27	14.034.157	100,00%	86,41%	27,00	14.034.157	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	0,00	-	0,00	-	432	973.967.400	108	216.257.040	216	238.725.640	324	233.309.940	432	919.702.560	432	94.43%	432,00	919.702.560	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
								Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan																		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* (%)	0,00		0,00		100	910.869.785	-	20.585.800	24	105.950.750	-	218.964.876	-	276.082.900	-	621.584.326	0,00%	68,24%	0,00	621.584.326	0,00%	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (Unit)	0,00		0,00		4	234.833.680	1	17.676.000	1	21.696.000	2	60.161.326	4	67.314.900	4	166.848.226	100,00%	71,05%	4,00	166.848.226	0,00%	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	0,00		0,00		21	215.925.851	-	-	12	74.884.750	18	45.773.550	21	32.598.000	21	153.256.300	100,00%	70,98%	21,00	153.256.300	0,00%	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara* (unit)	0,00		0,00		9	66.670.000	-	2.909.800	2	4.465.000	6	-	9	26.145.000	9	33.519.800	100,00%	50,28%	9,00	33.519.800	0,00%	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terelabilitasi/terpelihara* (unit)	0,00		0,00		5	190.939.534	-	-	-	-	-	113.030.000	1	24.750.000	1	137.780.000	20,00%	72,16%	1,00	137.780.000	0,00%	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terelabilitasi/terpelihara* (unit)	0,00		0,00		6	202.500.720	-	-	1	4.905.000	-	-	5	125.275.000	5	130.180.000	83,33%	64,29%	5,00	130.180.000	0,00%	0,00%	0,00%
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	0,00		0,00		100	25.231.545.470	-	7.378.013.356	17	3.661.422.531	81	6.083.945.633	-	6.001.345.159	-	23.124.726.679	0,00%	91,65%	0,00	23.124.726.679	0,00%	0,00%	0,00%
		Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD	Terbayanya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	0,00		0,00		12	24.756.352.220	3	7.378.013.356	6	3.661.422.531	9	5.913.044.733	12	5.788.513.159	12	22.740.993.779	100,00%	91,86%	12,00	22.740.993.779	0,00%	0,00%	0,00%
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya Pakaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	0,00		0,00		152	405.193.250	-	-	-	-	-	170.900.900	152	154.875.000	152	325.775.900	100,00%	80,40%	152,00	325.775.900	0,00%	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD (Orang)	0,00		0,00		35	70.000.000	-	-	-	-	-	-	31	57.957.000	31	57.957.000	88,57%	82,80%	31,00	57.957.000	0,00%	0,00%	0,00%
		Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfungsinya kegiatan fraksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	0,00		0,00		100	832.298.725	-	45.380.000	15	115.835.000	38	217.770.000	-	393.012.000	-	771.997.000	0,00%	92,75%	0,00	771.997.000	0,00%	0,00%	0,00%
		Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Peserta Rapat (Orang)	0,00		0,00		192	33.554.289	-	1.850.000	-	1.440.000	-	2.900.000	2	3.233.000	2	9.423.000	1,04%	28,08%	2,00	9.423.000	0,00%	0,00%	0,00%
		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	0,00		0,00		308	798.744.436	45	43.530.000	92	114.395.000	167	214.870.000	270	389.779.000	270	762.574.000	87,66%	95,47%	270,00	762.574.000	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja %</b>												
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		19	85.760.449	-	-	1	-	4	962.000	9	2.605.000	9	3.567.000	47,37%	4,16%	9,00	3.567.000	0,00%	0,00%	0,00%
		Pemberituluk Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		19	6.997.821.500	-	224.461.740	1	209.505.896	4	2.010.846.265	9	1.809.386.485	9	4.254.200.386	47,37%	60,79%	9,00	4.254.200.386	0,00%	0,00%	0,00%
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		19	9.796.309	-	-	1	-	4	-	9	2.645.800	9	2.645.800	47,37%	27,01%	9,00	2.645.800	0,00%	0,00%	0,00%
		Penyelenggaran Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00		0,00		19	9.796.309	-	-	1	-	4	-	9	2.645.800	9	2.645.800	47,37%	27,01%	9,00	2.645.800	0,00%	0,00%	0,00%

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**TRIWULAN I**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan					
								Rp	%				
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	23,52%	17.000.000,00	3,41%	0,00%	2.467.500,00	3,41%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	25,00%	1.208.403.612,00	19,56%	1,54%	945.524.802,00	19,56%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	60,14%	10.576.875,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	37,51%	15.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	152.000.000,00	55,88%	0,14%	84.937.996,00	55,88%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	12,21%	0,00%	1.380.000,00	12,21%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	86,83%	1.425.425.000,00	41,14%	1,10%	675.370.983,00	41,14%	Tidak Ada			
4.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	789.167.449,00	14,23%	0,18%	112.285.793,00	14,23%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	66,88%	141.300.600,00	28,19%	0,10%	59.564.475,00	28,19%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	25,39%	247.294.350,00	22,20%	0,35%	216.257.040,00	22,20%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	66,36%	145.980.000,00	8,03%	0,03%	17.676.000,00	8,03%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	62,19%	126.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.370.000,00	4,38%	0,00%	2.909.800,00	4,38%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	194.888.344,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan						
							Rp	%					
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	190.955.908,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>												
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	25,86%	6.401.503.059,00	29,80%	12,05%	7.378.013.356,00	29,80%	Tidak Ada			
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	191.518.250,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>												
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	48,72%	15.426.574,00	5,84%	0,00%	1.850.000,00	5,84%	Tidak Ada			
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	57,03%	341.549.284,00	7,27%	0,07%	43.530.000,00	7,27%	Tidak Ada			
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>												
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>												
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	42,74%	62.300.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	31,45%	2.122.500.000,00	3,30%	0,36%	224.461.740,00	3,33%	Tidak Ada			
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	45,36%	4.443.571,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	97,60%	200.937.438,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>												
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	43,57%	38.607.213,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>												
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	50,31%	54.666.296,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>												
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	1.264.425.000,00	10,17%	0,21%	128.533.800,00	10,17%	Tidak Ada			
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	46,69%	357.854.746,00	2,37%	0,03%	18.152.276,00	2,37%	Tidak Ada			
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	36,87%	149.495.000,00	20,72%	0,14%	84.000.000,00	20,72%	Tidak Ada			
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	35,92%	107.637.492,00	22,43%	0,11%	67.200.000,00	22,43%	Tidak Ada			
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>												
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	41,41%	766.190.341,00	1,07%	0,03%	19.792.800,00	1,07%	Tidak Ada			
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>												
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	25,08%	3.504.367.547,00	13,58%	3,10%	1.897.355.018,00	13,58%	Tidak Ada			
		<b>61.202.812.673</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>32,28%</b>	<b>20.465.508.126</b>		<b>19,57%</b>	<b>11.981.263.379</b>	<b>19,58%</b>				

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**TRIWULAN II**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan					
				(%)	(Rp)			Rp	%				
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	47,04%	34.000.000,00	3,41%	0,00%	2.467.500,00	3,41%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	66,67%	3.222.409.632,00	43,28%	3,42%	2.092.227.059,00	43,28%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	89,03%	15.656.780,00	36,92%	0,01%	6.493.500,00	36,92%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	74,96%	29.972.638,00	23,03%	0,02%	9.210.300,00	23,03%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	152.000.000,00	55,88%	0,14%	84.937.996,00	55,88%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	91,18%	0,02%	10.308.332,00	91,18%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaardaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	55,00%	0,03%	16.174.650,00	54,66%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	100,00%	1.641.575.000,00	72,52%	1,95%	1.190.549.495,00	72,52%	Tidak Ada			
4.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	789.167.449,00	30,09%	0,39%	237.465.442,00	30,09%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	100,00%	211.290.600,00	56,37%	0,19%	119.101.405,00	56,37%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	39,40%	0,01%	6.399.157,00	39,40%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	50,78%	494.588.700,00	46,71%	0,74%	454.982.680,00	46,71%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	100,00%	219.994.580,00	17,90%	0,06%	39.372.000,00	17,90%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	100,00%	202.596.117,00	36,96%	0,12%	74.884.750,00	36,96%	Tidak Ada			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
				(%)	(Rp)			Rp	%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.370.000,00	11,11%	0,01%	7.374.800,00	11,11%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	194.888.344,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	190.955.908,00	2,57%	0,01%	4.905.000,00	2,57%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	64,74%	16.026.974.824,00	44,59%	18,04%	11.039.435.887,00	44,59%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	191.518.250,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	75,53%	23.918.537,00	10,39%	0,01%	3.290.000,00	10,39%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	81,92%	490.652.732,00	26,37%	0,26%	157.925.000,00	26,37%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>										
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	71,15%	103.713.255,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	62,92%	4.245.600.519,00	6,43%	0,71%	433.967.636,00	6,43%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	75,98%	7.443.571,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	100,00%	205.878.503,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	77,43%	68.607.213,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	83,44%	90.666.296,00	10,96%	0,02%	11.911.700,00	10,96%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	1.264.425.000,00	42,07%	0,87%	531.929.600,00	42,07%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	74,77%	573.051.108,00	13,98%	0,18%	107.158.276,00	13,98%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	68,43%	277.495.000,00	41,43%	0,27%	168.000.000,00	41,43%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	67,96%	203.637.492,00	46,20%	0,23%	138.442.500,00	46,20%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	71,77%	1.328.005.341,00	13,03%	0,39%	241.172.700,00	13,03%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	50,27%	7.024.735.094,00	33,88%	7,74%	4.734.303.024,00	33,88%	Tidak Ada	
		<b>61.202.812.673</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>62,69%</b>	<b>39.743.512.660</b>		<b>35,82%</b>	<b>21.924.390.389</b>	<b>35,82%</b>		

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**TRIWULAN III**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan					
				(%)	(Rp)			Rp	%				
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	83,40%	60.272.104,00	18,72%	0,02%	13.525.900,00	18,72%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	91,67%	4.430.813.244,00	68,44%	5,41%	3.308.305.978,00	68,44%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	100,00%	17.586.898,00	36,92%	0,01%	6.493.500,00	36,92%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	100,00%	39.987.385,00	60,98%	0,04%	24.386.300,00	60,98%	Tidak Ada			
4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	152.000.000,00	60,64%	0,15%	92.169.006,00	60,64%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	91,18%	0,02%	10.308.332,00	91,18%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	54,78%	0,02%	13.469.710,00	54,78%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaardaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	58,56%	0,03%	17.328.650,00	58,56%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	100,00%	1.641.575.000,00	94,36%	2,53%	1.548.948.084,00	94,36%	Tidak Ada			
4.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	789.167.449,00	66,81%	0,86%	527.238.442,00	66,81%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	100,00%	211.290.600,00	89,89%	0,31%	189.929.407,00	89,89%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	39,40%	0,01%	6.399.157,00	39,40%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	76,17%	741.883.050,00	70,67%	1,12%	688.292.620,00	70,67%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	100,00%	219.994.580,00	45,24%	0,16%	99.533.326,00	45,24%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	100,00%	202.596.117,00	59,56%	0,20%	120.658.300,00	59,56%	Tidak Ada			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
				(%)	(Rp)			Rp	%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.370.000,00	11,11%	0,01%	7.374.800,00	11,11%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	194.888.344,00	58,00%	0,18%	113.030.000,00	58,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	190.955.908,00	2,57%	0,01%	4.905.000,00	2,57%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	90,15%	22.316.757.883,00	68,48%	27,70%	16.952.480.620,00	68,48%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	191.518.250,00	100,00%	0,31%	170.900.900,00	89,23%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	93,68%	29.666.291,00	19,55%	0,01%	6.190.000,00	19,55%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	96,11%	575.627.022,00	62,24%	0,61%	372.795.000,00	62,24%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>										
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	84,87%	123.713.255,00	0,66%	0,00%	962.000,00	0,66%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	79,00%	5.330.469.090,00	36,23%	3,99%	2.444.813.901,00	36,23%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	100,00%	9.796.309,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	100,00%	205.878.503,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	100,00%	88.607.213,00	16,17%	0,02%	14.325.400,00	16,17%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	100,00%	108.666.296,00	13,65%	0,02%	14.827.700,00	13,65%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	1.264.425.000,00	56,85%	1,17%	718.840.547,00	56,85%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	97,06%	743.862.014,00	30,65%	0,38%	234.934.026,00	30,65%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	100,00%	405.495.000,00	62,15%	0,41%	252.000.000,00	62,15%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	100,00%	299.637.492,00	68,63%	0,34%	205.642.500,00	68,63%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	74,42%	1.377.005.341,00	24,43%	0,74%	452.100.800,00	24,43%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	75,23%	10.512.102.641,00	47,71%	10,89%	6.666.351.357,00	47,71%	Tidak Ada	
		<b>61.202.812.673</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>83,12%</b>	<b>52.694.332.456</b>		<b>57,71%</b>	<b>35.299.461.263</b>	<b>57,68%</b>		

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**TRIWULAN IV**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan					
				(%)	(Rp)			Rp	%				
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	100,00%	72.272.104,00	37,34%	0,04%	26.984.500,00	37,34%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	100,00%	5.053.614.428,00	100,00%	7,97%	4.466.601.769,00	88,38%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	100,00%	17.586.898,00	74,68%	0,02%	13.133.100,00	74,68%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	100,00%	39.987.385,00	62,27%	0,04%	24.898.300,00	62,27%	Tidak Ada			
4.02.01.2.02.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	323.500.000,00	31,51%	0,16%	101.948.786,00	31,51%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	91,18%	0,02%	10.308.332,00	91,18%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	58,17%	0,02%	14.301.710,00	58,17%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaardaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	58,56%	0,03%	17.328.650,00	58,56%	Tidak Ada			
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	100,00%	2.141.497.250,00	96,91%	3,27%	2.075.250.765,00	96,91%	Tidak Ada			
4.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	1.172.858.967,00	80,63%	1,49%	945.727.522,00	80,63%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	100,00%	311.290.912,00	83,14%	0,41%	258.810.236,00	83,14%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	86,41%	0,02%	14.034.157,00	86,41%	Tidak Ada			
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	100,00%	973.967.400,00	94,43%	1,45%	919.702.560,00	94,43%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	100,00%	234.833.680,00	71,05%	0,26%	166.848.226,00	71,05%	Tidak Ada			
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	100,00%	215.925.851,00	70,98%	0,24%	153.256.300,00	70,98%	Tidak Ada			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
				(%)	(Rp)			Rp	%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.670.000,00	50,28%	0,05%	33.519.800,00	50,28%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	190.939.534,00	72,16%	0,22%	137.780.000,00	72,16%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	202.500.720,00	64,29%	0,21%	130.180.000,00	64,29%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	100,00%	24.756.352.220,00	91,86%	35,87%	22.740.993.779,00	91,86%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	405.193.250,00	100,00%	0,64%	325.775.900,00	80,40%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	83,00%	0,09%	57.957.000,00	82,80%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	100,00%	33.554.289,00	28,08%	0,01%	9.423.000,00	28,08%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	100,00%	798.744.436,00	95,47%	1,20%	762.574.000,00	95,47%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>										
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	100,00%	85.760.449,00	4,16%	0,01%	3.567.000,00	4,16%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	100,00%	6.997.821.500,00	60,79%	6,71%	4.254.200.386,00	60,79%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	100,00%	9.796.309,00	27,01%	0,00%	2.645.800,00	27,01%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	100,00%	205.878.503,00	75,56%	0,25%	155.566.200,00	75,56%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	100,00%	94.394.280,00	40,72%	0,06%	38.438.200,00	40,72%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	100,00%	67.398.169,00	22,00%	0,02%	14.827.700,00	22,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	2.164.425.000,00	52,32%	1,79%	1.132.384.097,00	52,32%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	100,00%	778.261.715,00	59,97%	0,74%	466.744.776,00	59,97%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	100,00%	405.495.000,00	82,86%	0,53%	336.000.000,00	82,86%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	100,00%	299.637.492,00	91,06%	0,43%	272.842.500,00	91,06%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	100,00%	1.074.297.701,00	63,54%	1,08%	682.638.800,00	63,54%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	100,00%	14.048.620.198,00	66,51%	14,74%	9.344.032.565,00	66,51%	Tidak Ada	
		<b>61.202.812.673</b>	<b>63.394.799.817</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.394.799.817</b>		<b>80,10%</b>	<b>50.111.226.416</b>	<b>79,05%</b>		

## MATRIK KESELARASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

### Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariata DPR			1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian.	Prosentasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b> Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b> Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD <b> Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b> Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani		29.591.393 2.141.497.250  973.967.400 405.193.250  70.000.000	
										<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas	Jumlah diklat/bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi		323.500.000	
										Peningkatan Kapasitas DPRD					
										Pendalaman Tugas DPRD	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi		2.164.425.000  405.495.000 299.637.492	
										Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan			
										Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan			
										<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan		11.304.939 24.586.745 1.172.858.967  311.290.912 16.241.100	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik		234.833.680		

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)				
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT			
										Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					215.925.851			
						2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD. Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya		<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i> Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Melaksanakan penyebarluasan informasi/pemberitaan DPRD	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose			66.670.000	190.939.534	
						3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD			778.261.715		
						4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i> Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan			72.272.104		
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			<i>Layanan Administrasi DPRD</i> Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD <i>Fasilitasi Tugas DPRD</i> Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat DPRD	Jumlah Rapat yang difasilitasi			17.586.898	5.053.614.428		
															24.756.352.220			
															39.987.385			
															33.554.289	798.744.436		
															14.048.620.198			





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21863

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 38 /SET.DPRD/2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;

b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah

c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

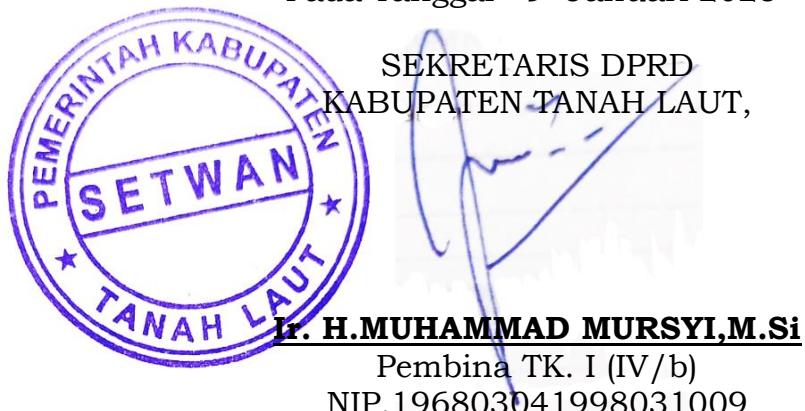
**KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;

- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan Bagian terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada Tanggal 9 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
 NOMOR : 38 /SET.DPRD/2023  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Keuangan	Ketua
2.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum dan Humas	Anggota
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Anggota





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

# SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21863

## K E P U T U S A N

### SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

### NOMOR : 4.b/SET.DPRD/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

#### PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT.
- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 4 Januari 2022.



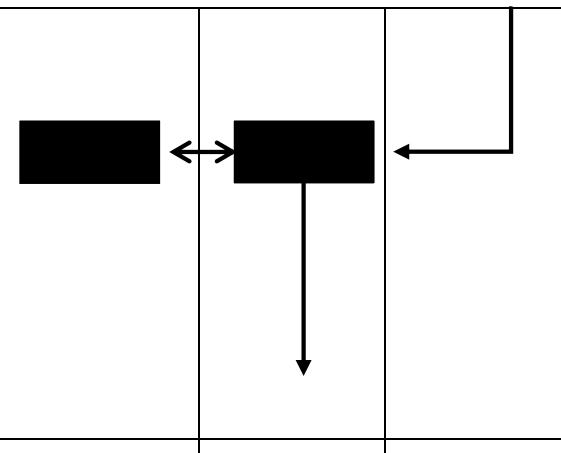
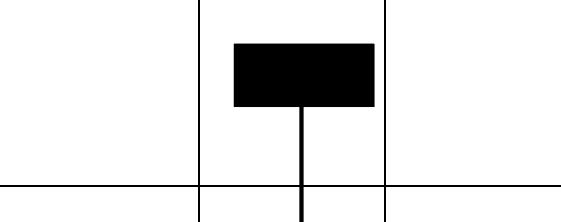
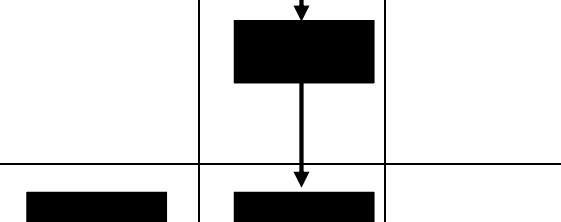
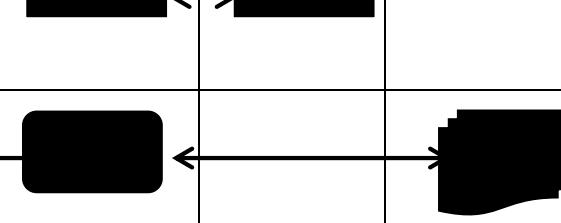
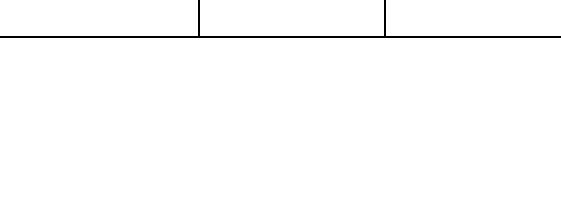
Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut  
 Nomor : Nomor 05 Tahun 2022  
 Tanggal : 4 Januari 2022

## A. INFORMASI PROSEDUR

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>  <b>SEKRETARIAT DPRD</b></p>	Nomor SOP	
		Tgl pembuatan sebelum disahkan	
		Tgl ujicoba	
		Tgl Pengesahan	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dasar Hukum		Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> </ol>
Identifikasi Risiko		Pencatatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan pengetahuan tim penyusun</li> <li>2. Peraturan yang selalu berubah (dinamis)</li> <li>3. Tidak lengkapnya data yang diperlukan</li> </ol>

## B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kabag Keuangan	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun Lakip SKPD					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Sekretaris					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip	
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Sekretaris					Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun Lakip SKPD ditandatangani Sekretaris	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi					Jadwal/agenda kerja dan matrik (checlist)materi/bahan penyusuna Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip	
5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD					Data dan informasi (tupoksi,struktur tata laksana, kepegawaian).renstra,IKU,RKT,RKA,Lakip thn sebelumnya dan info lainnya	7 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	

6	Analisis				Gambaran tupokasi,SDM,kinerja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis.visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,program/kegiatan/indikator kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis,Teridentifikasi program/kegiatan yang beroreantasyi hasil	
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD				Draf rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD				Naskah Rancangan Lakip SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan Lakip SKPD(visi misi ,keselerasantujuan,sasar,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD				Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelaras	1 Hari	Dokumen ditetapkan Lakip oleh Sekretaris	
10	Penetapan Lakip SKPD				Lakip yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen ditetapkan Lakip oleh Sekretaris, dan dilakukan penggandaan dokumen oleh Sekretariat	